MOHAMAD GUNTUR ROMLI
DAN TIM CIPUTAT SCHOOL

Islam Kita
Islam Nusantara

Lima Nilai Dasar Islam Nusantara

PENGANTAR: DENNY J.A.

Islam Kita, Islam Nusantara

Lima Nilai Dasar Islam Nusantara

MOHAMAD GUNTUR ROMLI

DAN TIM CIPUTAT SCHOOL

Pengantar
Denny JA

Editor
Nong Darol Mahmada

Design & Layout
Futih Aljihadi
Heri Saparirudin

Edisi Pertama, Februari 2016

Publisher
Ciputat School
Jalan RE Martadinatha No. 19 Ciputat
Tangerang Selatan, Indonesia

MOHAMAD GUNTUR ROMLI
DAN TIM CIPUTAT SCHOOL

PENGANTAR:

DENNY J.A.

DAFTAR ISI

LIMA NILAI DASAR ISLAM NUSANTARA

1. Kami memahami Muslim sebagai identitas kolektif atas siapapun yang menganggap dirinya Muslim yang meyakini Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul (utusan) Allah Swt, terlepas dari perbedaan tafsir atas agama Islam. Mengenai perbedaan tafsir itu, kami berpandangan biarlah itu urusan individu yang bersangkutan dengan Tuhannya, yang tak patut diintervensi oleh negara atau pihak lain.

2. Kami memperjuangankan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasi manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, paham agama, dan sebagainya. Kami menolak segala bentuk kebencian baik yang berwujud ucapan *(hate speech)*, tulisan dan tindakan terhadap suku, gender, ras, disabilitas, agama, aliran, paham keagamaan apapun, karena bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam.

3. Berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM) maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini.

4. Berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini.

5. Berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila dan pilar-pilar keindonesiaan, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini.

Peradaban Islam dengan Enam Indikator

Denny J.A*[1]

"Tak ada yang lebih powerful,' ujar Victor Hugo, " dibandingkan dengan sebuah gagasan yang waktunya sudah datang. " *All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come*."

Apakah waktu bagi gagasan Islam Nusantara sudah datang? Sehingga gagasan Islam Nusantara tak hanya berhenti sebagai wacana? Namun ia menjadi sebuah *movement* yang ikut mengubah wajah Islam, seberapapun kecilnya? Namun ia juga ikut mengubah peradaban, seberapapun kecilnya?

Di tahun 2015, lembaga riset terkemuka berpusat di Amerika Serikat: Pew Reseach Center mempublikasi temuannya. Diproyeksikan di tahun 2070, agama Islam akan menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia.[2] Saat itu pemeluk agama Islam melampaui tak hanya agama Kristen namun juga melebihi populasi mereka yang tak percaya agama.

---

[1] Denny JA, Ph.D, pelopor Indonesia Tanpa Diskriminasi dan aktivis Ciputat School
[2] http://www.voanews.com/content/survey-islam-become-world-largest-religion/2741077.html

Karena Muslim akan menjadi mayoritas di dunia, dengan sendirinya baik dan buruk peradaban Islam akan semakin mempengaruhi peradaban dunia. Akankah warga dunia, termasuk anak dan cucu kita, mewarisi sebuah peradaban yang semakin cemerlang dan damai? Atau sebaliknya? Ini juga akan semakin dipengaruhi oleh bagaimana peradaban Islam tumbuh dan berkembang.

Buku soal Islam Nusantara ini bisa dilihat sebagai ikhtiar ikut membangun peradaban Islam. Buku ini ditulis oleh Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School yang terbiasa berwacana soal Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan Indonesia tanpa diskriminasi. Tentu banyak variabel dan kekuatan yang bekerja membentuk sejarah dan peradaban. Namun gagasan sekecil apapun, seperti yang ditampilkan buku ini adalah sebuah langkah. Ia memberikan tawaran menampilkan nilai dasar Islam yang lebih sesuai dengan peradaban di era Google.

Enam Indikator

Bagaimanakah wajah peradaban Islam masa kini? Berdasarkan enam indikator yang terukur, kultur Islam bukan lagi peradaban yang unggul. Enam indikator ini diukur oleh berbagai lembara riset terkemuka. Data ini juga memberikan informasi mengenai wajah komunitas Muslim jika dibandingkan dengan sisa dunia.

Dalam tulisan ini, indikator kekuatan ekonomi diukur oleh International Monetary Fund (IMF) berdasarkan GDP nominal, di tahun 2014. Indikator politik dengan indeks demokrasi diukur oleh Economist Inteligence Unit, 2014. Indikator kultural berupa sumbangan pada ilmu pengetahuan diukur oleh banyak lembaga dan dirumuskan dalam sebuah laporan di the New Atlantis, 2011. Indikator kondisi mental populasinya dengan indeks *happiness* diukur oleh United Nations Sustainable Development (UNSD), 2013. Indikator penerimaan atas keberagaman dan toleransi diukur oleh Pew Research Center, 2009. Indikator Islamicity diukur oleh George Washington University, 2011.

Pertama, dari sisi kekuatan ekonomi (GDP nominal sebuah negara), negara yang mayoritas populasinya

Muslim bukan kekuatan utama dunia. Negara yang populasi mayoritas Muslim paling tinggi ada di urutan ke 16 (Indonesia), 18 (Turki), dan 19 (Saudi Arabia).

Negara terbesar di dunia dari sisi kekuatan ekonomi dari rangking 1 sampai 15 datang dari aneka benua dan kultur. Di antaranya termasuk negara Amerika Serikat, China, Jepang, German, Brazil dan Australia.[3] Negara yang mayoritasnya Muslim tak ada satupun yang bertengger di 15 besar dunia.

Kedua, dari sisi politik, diukur dari indeks demokrasi, negara yang mayoritasnya Muslim juga ada di urutan papan tengah dan belakang. Urutan 1-48 adalah negara barat, seperti Norwegia, Swedia, Amerika Serikat. Juga termasuk dalam list itu aneka negara di Asia: Jepang, Korea Selatan. Ada juga negara dari Amerika Latin: Brazil, Chili, Portugal. Bahkan ada juga negara di Asia Tenggara: Timor Leste.

Negara yang mayoritas populasinya muslim yang ada di urutan tertingi untuk kualitas demokrasi adalah Indonesia (rangking 49), Malaysia (65) dan Mali (83). Tak hanya ekonomi, tapi juga diukur secara politik dari

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29

indeks demokrasi, negara yang mayoritas populasinya Muslim jauh tertinggal.[4]

Ketiga, dari sisi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, peradaban Muslim juga jauh di belakang. Rata-rata di negara muslim hanya memiliki sembilan *scientists, engineers dan technicians* per-seribu populasi. Sementara rata-rata dunia memiliki 41 orang. Dari sisi jumlah profesional yang bergerak di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, rata-rata dunia memiliki hampir lima kali lipat dibandingkan rata-rata negara muslim.

Dari total 1,6 milyar penganutnya, komunitas Muslim hanya menyumbangkan dua penerima hadiah nobel. Dari 46 negara Muslim hanya menyumbang 1 persen saja kepada literatur dunia. Total keseluruhan 46 negara Muslim itu bahkan kalah dibandingkan sumbangan negara India sendiri. Bahkan total 46 negara Muslim itu kalah juga dengan negara Spanyal sendiri.

Dari tahun 1980-2000, 9 negara Arab hanya mendaftarkan 370 hak paten penemuannya. Sementara hanya Korea Selatan sendiri, dalam periode yang sama mendaftarkan hak paten sebanyak 16.328, hampir 50 kali lebih banyak dibandingkan 9 negara Arab.[5]

---

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
[5] http://www.thenewatlantis.com/publications/why-the-arabic-world-turned-away-from-science

Keempat, diukur dari sisi kebahagian populasi yang hidup di sebuah negara, negara mayoritas populasinya Muslim juga tidak unggul. Rangking tertinggi 1-19 negara yang populasinya paling bahagia di dunia berasal dari aneka benua dan aneka kultur. Namun negara itu tidak dari peradaban Islam. Negara dengan rangking kebahagian populasi tertinggi umumnya di eropa, terutama di aneka negara seperti Swiss, Denmark. Terdapat juga negara Amerika Latin: Brazil, dan Australia.

Negara yang mayoritas populasinya Muslim, yang memiliki tingkat indeks kebahagian tertinggi adalah Emirat Arab (rangking 20), Oman (22), dan Qatar (28). Indonesia terperosok jauh ke rangking 76.[6]

Kelima, diukur dari praktek kebebasan agama, gabugan indeks pembatasan pemerintah dan permusuhan masyarakat satu sama lain, hasilnya tak jauh berbeda. Negara yang paling bebas dan menerima keberagama datang dari aneka benua dan kultur, seperti Brazil, Afrika Selatan, Filipina, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris.

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report#2013_ranking_.282010-12_surveys.29

Negara yang mayoritasnya muslim berada di papan tengah bahkan bawah. Termasuk negara yang dinilai terburuk kebebasan beragama dan toleransinya adalah Pakistan, Iran, Mesir dan Indonesia sendiri. [7]

Keenam, diukur dari nilai keislaman sendiri, negara mayoritas Muslim juga tidak utama. George Washington University mengembangkan Islamicity indeks berdasarkan 113 variabel mengenai nilai yang dianjurkan AL-QURAN. Aneka variabel ini sudah merangkum nilai ekonomi, hukum, politik ataupun kebaikan secara umum.

Hasilnya, negara yang paling islami, yang paling mempraktekkan anjuran nilai Islam, rangking 1- 32 justru bukan negara yang mayoritasnya Islam. Daftar negara dengan islamicity Indeks terbaik justru negara Eropa seperti Ireland, Denmark, Kanada, Portugal. Masuk juga dalam list terbaik itu negara dari benua dan kultur lain seperti Israel dan Singapura.

Negara mayoritas Muslim yang tertinggi islamicty indeksnya adalah Malaysia (rangking 33), Kuwait (42), dan Saudi Arabia (91). Negara Indonesia terpuruk ke rangking 140. [8]

---

[7] http://www.pewforum.org/2009/12/17/global-restrictions-on-religion/

[8] http://thereflectiveperspectivesblog.blogspot.co.id/2011/12/on-islamicity-index.html

Dari enam indikator yang terukur itu, peradaban Islam bukan saja tak unggul. Namun untuk kasus penerimaan kepada demokrasi dan hak asasi manusia seperti kebebasan agama, komunitas Islam sangat tertinggal. Bahkan di beberapa wilayah, komunitas Islam justru unggul dari sisi buruknya seperti kekerasan dan konflik yang tinggi.

Dengan kualitas peradaban seperti itu, kawasan Muslim tidak menjadi bagian dari solusi, tapi bagian dari problem. Bertambah banyaknya penganut Islam berarti semakin tak nyamannya peradaban. Apalagi jika Muslim menjadi komunitas agama terbesar di dunia di tahun 2070.

Apa yang salah? *What went wrong*?

Ikhtiar

Sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah menjadi penerang dan puncak peradaban dunia. Itu terjadi di abad 9 - 13, justru ketika dunia barat masih dalam era kegelapan dan jahiliyah. Pusat ilmu dan riset justru berpusat di wilayah yang mayoritas populasinya Muslim. Itu adalah era ketika peradaban Islam justru bersinerji

dengan peradaban terbaik era itu dari Yunani.[9]

Fakta sejarah di abad itu membuktikan bahwa agama Islam juga bisa terdepan, menjadi sumbu utama kemajuan peradaban. Yaitu ketika Islam dipraktekkan dengan interpretasi tertentu. Jika ada masalah dengan Islam berarti itu problem dengan interpretasi Islam, bukan dengan agama Islam itu *an sich*. Solusi terhadap ketertinggalan Islam dengan sendirinya adalah reinterpretasi Islam.

Walau Islam itu satu, sebagaimana agama besar lain, namun Islam dalam sejarah sudah dipraktekkan dengan aneka pemahaman, yang sangat liberal sampai yang sangat konservatif. Sejarah agama pada dasarnya adalah sejarah interpretasi agama.

Islam yang tumbuh di Arab Saudi misalnya sangat berbeda dengan Islam yang tumbuh di Amerika Serikat walau penganutnya mengklaim bersumber pada Al-Quran yang sama. Cukup dilihat satu isu saja soal paham atas peran wanita di dunia wilayah itu.

Di Arab Saudi, ada aturan wanita dilarang mengemudikan mobil sendirian.[10] Larangan ini didukung oleh

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age
[10] http://ideas.time.com/2013/10/25/forbidden-to-drive-a-saudi-woman-on-life-inside-the-kingdom/

kesepakatan ulama. Ini kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mendasarkan segala hal kepada Quran dan Hadits melalui penafsiran ulamanya.

Sebaliknya di Amerika, peran wanita begitu liberalnya bahkan melampaui apa yang dibayangkan feminis modern. *Muslim Progresive Values* misalnya mempraktekkan persamaan hak wanita untuk juga menjadi Iman Sholat bagi seluruh jamaah, termasuk laki-laki. Di Amerika Serikat sudah berkali-kali dipraktekkan wanita memimpin sholat di masjid yang juga dihadiri jemaah lelaki. [11]

Di era yang sama, di era digital seperti sekarang, di kalangan penganut Islam yang sama, kita melihat dua komunitas mempraktekan Islam dengan nilai yang sangat berbeda. Di Arab Saudi, wanita dilarang mengemudi mobil sendirian. Di Amerika Serikat, wanita menjadi iman sholat untuk jemaah yang juga ada lelaki di dalamnya.

Islam adalah satu jika mengacu pada sumber rujukannya: Al-Quran. Namun ketika Islam masuk ke dalam sejarah kongkret, dengan aneka keberagaman kultur, dengan aneka level kesadaran, dengan aneka kepentingan, maka

---

[11] https://www.facebook.com/mpvusa/

ada banyak Islam. Lebih tepatnya ada banyak tafsir dan interpretasi Islam, mulai dari yang paling kaku dan konservatif hingga kepada yang paling liberal dan progresif.

Buku yang disusun Mohamad Guntur Romli dan Ciputat School adalah bagian dari interpretasi Islam yang progresif itu. Ia menampilkan kembali *essesial teaching* atau nilai dasar Islam yang lebih modern. Di abad keemasannya, Islam bersinerji dengan peradaban Yunani. Kini dalam konsep Islam Nusantara, yang dimajukan Guntur Romli beserta team Ciputat School, adalah Islam ingin disinerjikan dengan prinsip ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, demokrasi dan pancasila.

Di bagian awal, Mohamad Guntur cukup panjang dan detail menguraikan bagaimana Islam dipraktekkan dengan aneka kekayaan kultur lokal di aneka daerah. Di bagian selanjutnya yang menjadi gagasan besarnya adalah bagaimana Islam Nusantara harus dirumuskan.

Jika Islam Nusantara hanyalah kristalisasi Islam yang sudah dipraktekkan di Nusantara, maka tetap akan kita dapati konsep Islam yang sudah terbukti tidak

membawa Indonesia pada puncak peradaban dunia. Islam Nusantara yang berangkat dari apa yang sudah dijalankan di Indonesia tetaplah konsep Islam yang usang. Islam Nusantara yang dirindukan adalah sejenis pemahaman baru yang lebih sejiwa dengan puncak peradaban dunia baru, yang kini masuk ke era digital, dengan keberagaman yang kompleks.

Sudah banyak wacana Islam Nusantara yang dipublikasi sejak istilah ini populer di seputar Muktamar NU 2015. Namun belum ada buku yang utuh yang membahas lebih kongkret isi dari nilai dasar Islam Nusantara. Apa yang *in* dan *out* dalam Islam Nusantara? Apa yang membedakan Islam Nusantara dengan yang bukan Islam Nusantara. Dari perdebatan gagasan, jelas buku ini sebuah langkah maju yang berani untuk menawarkan bagaimana sebaiknya nilai dasar Islam Nusantara itu diformulasikan.

Dilihat dari karakter buku, jelas ini buku yang tak hanya mempunyai pretensi akademik. Ini buku putih yang juga dipersiapkan untuk memandu sebuah gerakan pemahaman agama. Terlebih lagi dalam proses penulisannya, buku ini tak hanya dirumuskan di belakang meja. Gagasan utama buku ini adalah

kristalisasi dari *brainstorming* yang sudah diuji dan diperkaya oleh aneka komunitas diskusi.

Sebagai sebuah konsep, buku ini sudah cukup utuh. Namun sebagai sebuah gerakan, buku ini adalah langkah pertama. Sukses atas tidak gagasan Islam Nusantara mempengaruhi masyarakat luas memang akan ditentukan oleh hal lain di luar sebuah buku. Tapi pada mulanya adalah kata. Pada mulanya adalah gagasan.

Kembali kepada kutipan Victor Hugo: serangan dari bala tentara dapat ditahan. Namun serangan dari sebuah gagasan yang waktunya sudah datang, tiada yang dapat menahannya. Pertanyaannya memang apakah waktu bagi Islam Nusantara sudah datang? Lebih umum lagi, apakah waktu bagi reformasi interpretasi Islam sudah tiba? ***

BAB I

LATAR BELAKANG ISLAM NUSANTARA

> *Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi*
>
> —Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

> *Islam Nusantara memiliki karakter Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran bukan "Islam Arab" yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara*
>
> —KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU

Islam Nusantara bukan istilah yang baru, namun kembali populer setelah dilemparkan ke publik oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam pembukaan acara *Istighotsah Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama NU*, Minggu, 14 Juni 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Menurut KH Said Aqil Siradj, NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara yang ia maksud merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya "dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras, Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya."

KH Said Aqil Siradj juga menambahkan Islam Nusantara memiliki karakter "Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran." Sebagai suatu model, Islam Nusantara berbeda dari apa yang disebutnya sebagai "Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara." Kita pun mafhum, apa yang sedang terjadi di beberapa negara Arab saat ini, seperti Libya, Suriah, Iraq, Mesir, Yaman yang tidak sepi dari kekerasan dan konflik bersaudara, serta yang terbaru bom bunuh diri yang menggoncang Saudi Arabia dan Kuwait.

Gayung bersambut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang saat itu hadir, membuka dan memberikan kata sambutan. Jokowi menceritakan dalam setiap

pidatonya di konferensi-konferensi internasional yang ia ikuti, seperti KAA (Konferesi Asia Afrika) dan G-20 ia menegaskan kebanggaan dan kekuatan bangsa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Di tengah perpecahan dan perang saudara di Timur Tengah yang penduduknya mayoritas muslim, Indonesia tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Alhamdulillah Islam kita, Islam Nusantara," puji Jokowi sekaligus membuka rahasia di balik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Islam Nusantara yang ia maksud adalah "Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi. Itu lah Islam Nusantara."

Nahdlatul Ulama, ormas keislaman terbesar di Indonesia tengah gencar mempromosikan istilah Islam Nusantara yang akan menjadi tema Muktamar ke-33 yang akan dihelat di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia".

Selain Jokowi, dukungan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusul Kalla, yang sering memakai istilah Islam Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut menyambut gagasan Islam Nusantara ini dalam acara buka bersama dengan Ikatan Alumni PB PMII di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2015.

Lukman Saifuddin menerangkan wacana Islam Nusantara yang belakangan menjadi gagasan sebagian umat mengenai identitas Islam di Indonesia kini tengah menjadi perbincangan di dunia internasional. Dunia seakan tengah menempatkan Islam Indonesia sebagai model peradaban Islam modern. "Istilah Islam Nusantara kini menjadi sebuah wacana yang mendunia sekarang, di banyak perguruan tinggi ternama di Eropa maupun di Amerika. Islam Nusantara menjadi diskursus dan akan menjadi sebuah term."

Namun ia meminta agar istilah Islam Nusantara terus didalami karena ia mengkhawatirkan istilah ini akan dianggap sebagai pandangan atau faham yang justru bisa kontra produktif kalau tidak kita jelaskan dengan baik. Bisa-bisa Islam Nusantara dimaknai sebagai upaya memecahbelah atau mengotak-kotakan Islam, yang pada hakekatnya satu. "Ini tentu adalah tugas kita semua untuk bisa menjelaskan secara lebih gamblang, apa esensi, apa substansi dari istilah tersebut," pinta Menteri Agama. (portal kemenag.go.id)

Islam Nusantara pun bergulir ke publik. Diberitakan media-media dan menjadi percakapan di media-media sosial, facebook, twitter, blog, grup diskusi WhatApp,

BlackBerry dan lainnya dengan bermacam tanggapan, baik yang pro maupun kontra.

Sambutan terhadap Islam Nusantara datang dari komunitas muslim di Amerika Serikat yang mengadakan diskusi antara para pemuka agama, pengamat, diplomat, serta tokoh masyarakat di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Diskusi yang diprakarsai Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, Nusantara Foundation dan Dompet Dhuafa mengangkat tema Islam Nusantara. Islam Nusantara dijadikan contoh bagi negara-negara dunia untuk menunjukkan keragaman, toleransi dan demokrasi.

Salah seorang pembicaranya adalah Dr. James B. Hoesterey dari Universitas Emory di Atlanta, Georgia, ia mengatakan “Sebagai seorang antropolog yang sudah lama melakukan penelitian di Indonesia, saya senang bahwa dunia luar dan wakil-wakil serta duta besar dari negara masing-masing dapat mendengarkan sedikit lebih dalam mengenai Islam di Indonesia yang mungkin tidak sama dengan Islam di negara mereka, misalkan Arab Saudi. Kalau kita lihat ke depan, mungkin

Indonesia bisa menjadi contoh bagi seluruh negara."

Dr. Chiara Formichi, pakar sejarah Islam di Indonesia, dari Universitas Cornell di Ithaca, New York, mengatakan "Gagasan Islam Nusantara sangat erat dengan budaya dan sejarah Indonesia. Saya tidak tahu bisa diterapkan di negara lain atau tidak, tetapi yang jelas bisa menjadi contoh untuk mengerti mengapa seseorang memeluk Islam. Ada banyak cara untuk memahami Islam dan banyak cara untuk berinteraksi dengan non Muslim. Muslim di sana juga punya banyak pengalaman berbeda. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa dipetik." (voaindonesia.com 7 Juli 2015).

Setelah menjadi wacana publik, Islam Nusantara dibahas dari perspektif yang beragam, sekaligus beragam tanggapan, baik yang pro dan kontra. Kekhawatiran Menteri Agama bahwa istilah ini bisa dianggap sebagai memecah belah Islam yang hakikatnya satu mulai terbukti dengan munculnya alasan kubu yang menolak dengan nada yang sama seperti yang dikhawatirkan Menteri Agama. Kontroversi terletak pada istilah "Islam Nusantara", yang dituding penjelmaan Islam jenis baru. Pun juga komentar KH Said Aqil terhadap istilah "Islam Arab" yang menohok gerakan pemurniaan

Islam melakukan gerakan lebih ke arabisasi daripada islamisasi.

Dalam konteks ini, anjuran Menteri Agama untuk menjelaskan dan mengisi makna Islam Nusantara menemukan relevansinya. Apakah Islam Nusantara hanya satu model, seperti yang dibayangkan oleh kalangan Nahdliyin yang mempromisikannya? Bagaimana dengan "Islam-Islam lain" yang dipahami oleh ormas-ormas keislaman yang ada, atau Islam di luar Jawa yang menjadi basis kalangan Nahdliyin? Apakah hanya berkaitan dengan sejarah lama, ketika penjelasan lebih lanjut dari kalangan Nahdliyin Islam Nusantara ini merujuk pada era Wali Songo? Bagaimana dengan nilai-nilai keindonesiaan, dan masa depan Islam di Indonesia itu sendiri? Apa relevansinya Islam Nusantara untuk konteks saat ini dan mendatang? Bagaimana mempromosikan Islam Nusantara? Siapa saja yang mendukung, sekaligus yang menolaknya? Apa tantangan-tantangan Islam Nusantara di masa datang?

Islam Nusantara Bukan [Hanya] Islam di Nusantara

"Islam Nusantara" memiliki perbedaan dari "Islam *di* Nusantara". Nusantara pada istilah yang pertama adalah sifat, dalam bahasa pesantren disebut "mudhafun ilaihi"—ia mensifati kata Islam, dalam istilah lain, "Islam Nusantarawi". Sedangkan istilah kedua: Islam di Nusantara hanya menunjukkan Nusantara hanya sebagai tempat saja yang tidak memiliki hubungan, apalagi pengaruh terhadap Islam. Oleh karena itu "Islam Nusantara" bisa dipahami Islam dengan corak, warna, kekhasan, keunikan, karakter, budaya Nusantara.

Lantas, apa Nusantara itu? Di sini Nusantara tidak menunjuk pada satu model, corak, budaya, namun menunjuk pada keragaman yang ada di pulau-pulau Nusantara. Karena Nusantara merupakan kumpulan dari pulau-pulau, yang tidak kurang dari 17.000 pulau. Nusantara adalah nama yang pernah diajukan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyebut wilayah Indonesia masa kini. Nusantara yang disebut Mpu Prapanca dalam Kakawin Nagarakretagama sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, kepulauan

Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina.

Maka, Nusantara bukan Jawa, malah Nusantara dari nama aslinya: “nusa” (pulau) “antara” (lain/seberang) yakni pulau-pulau di seberang Jawa. Penyebutan Nusantara ini pula yang terkait dengan Kerajaan Majapahit untuk mengingatkan kita akan kebesaran masa lalu bangsa ini. Bangsa yang besar dan pernah berjaya.

BAB II

SEJARAH DAN KARAKTER ISLAM NUSANTARA

10 Warisan Sejarah dan Geografis Nusantara

Nusantara memiliki 10 karakter yang berasal dari (1) pengaruh sejarah dan (2) letak geografis (kawasan). 5 karakter merujuk pada pengaruh sejarah, 5 karakter berasal dari pengaruh kawasan.

Lima pengaruh sejarah:

1. Era Kuna. Era ini sering disebut Pra-Hindu-Buddha yang berasal dari kepercayaan, adat, dan budaya kuno yang "asli" Nusantara. Era ini mempercayai segala macam arwah, kekuatan magis pada alam dan benda. Sering pula disebut "animisme dan dinamisme". Di Jawa dikenal kepercayaan Kapitayan dengan sosok mitologis Danghyang Semar. Kapitayan digambarkan suatu keyakinan yang memuja sembahan utama

bernama Sanghyang Taya, yang bermakna Hampa, Kosong, Suwung—kata Jawa kuna ini terpelihara dalam bahasa Sunda, *Teu Aya.* Kepercayaan kuna ini sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat-masyarakat adat, seperti Kaharingan di suku-suku Dayak, Kalimantan, Buhun, Sunda Wiwitan, di Jawa Barat, Tonaas Walian, Minahasa, Sulawesi Utara, Tolottang dan Patungtung, Sulawesi Selatan, Naurus, Pulau Seram Maluku, Marapu, Sumba, Parmalim, Sumatera Utara, dan banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lainnya.

2. Era Hindu-Buddha. Era yang dikenal sebagai peradaban melalui kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, mulai Salakanagara (abad ke-2 M), Tarumanagara (abad ke-4 M) di Jawa Barat, Kutai (abad ke-4 M) di Borneo, Kalingga (abad ke-6 dan 7 M) dan Mataram Kuna (752-1045 M) di Jawa Tengah, Kahuripan-Jenggala-Kadiri-Singasari (1019-1292 M) di Jawa Timur, Dharmasraya (1183-1347 M) di Sumatera Barat dan dua kerajaan besar Sriwijaya (600-1100 M) di Sumatera Selatan dan Majapahit (1292-1527

M). Sriwijaya beragama Buddha dan Majapahit beragama Siwa-Budhha.

3. Era Islam. Agama Islam dipercaya sudah tiba ke bumi Nusantara sejak era awal Islam, abad ke-7 M. Bukti-bukti arkeologis ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik (1082 M), Sultan Malik Shalih di Aceh Utara (1297 M), Syaikh Maulana Malik Ibrahim, Gresik (1419 M), namun yang perlu dicatat, dari abad ke-7 M hingga pertengahan abad ke-15, Islam belum dianut secara luas oleh penduduk Nusantara, baru pada era dakwah Islam yang dipelopori oleh jaringan tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan Wali Songo, Islam tersebar luas khususnya di tanah Jawa. Islam dengan cepat terserap ke dalam asimilasi dan sinkritisme Nusantara. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai Demak, Cirebon di Jawa, Kutai Kartanegara di Kalimantan, Gowa dan Buton di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku dan lain-lainnya. Kesuksesan dakwah para Wali Solo terletak pada strategi mereka yang menekankan

kesinambungan ajaran Islam dengan ajaran dan tradisi sebelumnya, sehingga tidak terlihat asing, hal ini memungkinkan karena ajaran Islam yang dianut oleh Wali Songo adalah Islam Sufistik yang lebih mementingkan ajaran esoteris (hakikat, ruh, subtansi) daripada yang eksetoris (simbolis, lahir, artifisial). Era ini yang disebut Ricklefs sebagai "Sintesis Mistik" antara ajaran Islam dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Setelah era ini muncul ikhtiar pembaruan dalam bentuk "neo-sufisme dan syariat (fiqih)" melalui jaringan ulama Nusantara yang baru pulang dari Haramayn (Makkah-Madinah) pada abad ke-17 dan 18 M. Namun pembaruan ini bisa disebut sebagai pembaruan yang terbatas. Pada era ini, awal abad ke-19 M muncul "pembaruan yang radikal" di Sumatera Barat dengan kepulangan 3 orang Haji dari Makkah yang melihat dakwah dan kejayaan Kaum Wahhabi-Saudi pada Dinasti Saudi pertama. Gerakan ini menimbulkan konflik antara kaum Padri dan Kaum Adat yang berujung perang.

4. Era Kolonial dan Eropa. Era ini dimulai awal abad ke-16 dengan Portugis (1509M) dan Spanyol (1521 M). Portugis yang gagal menguasai Jawa dan terdesak oleh Belanda melakukan kolonialisasi di Indonesia bagian Timur, berbagi dengan Spanyol—VOC (1602-1800 M), Belanda (1816-1942 M) dan Jepang (1942-1945 M). Pada era ini hadir di bumi Nusantara agama Katholik (1546 M) dan Kristen Protestan (abad ke-16 M).[12] Yang penting dari era ini adalah pengaruh *modernisme* yang dimulai dari nilai-nilai modern dalam budaya kehidupan sehari-hari pendidikan, agama, budaya, gaya hidup, transportasi, hingga cara pikir yang mengedepankan rasionalitas. Tiga kandungan utama dari modernisme adalah teori dan praktik kapitalisme, industrialisasi dan negara bangsa. Pengaruh lain dari era ini adalah *Politik Etis*: irigasi, edukasi dan transmigrasi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan

[12] *(Dalam versi kuna, agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 melalui gereja Assiria (Gereja Timur) yakni berdiri di dua tempat yakni, Pancur (Deli Serdang) dan Barus (Tapanuli Tengah) di Sumatra (645 SM). Sejarah kedatangan telah tercatat oleh ulama Syaikh Abu Salih al-Armini dalam bukunya, "Tadhakur Akhbar min al-Kana'is wa al-Adyar min Nawabin Mishri wa al-Iqta'aih" (Daftar berita pada gereja-gereja dan monastries di provinsi-provinsi Mesir dan sekitarnya). Dalam bukunya (Abu Salih), tanah Indonesia masih dimasukkan dalam wilayah India (al-Hindah).*

dan kemajuan, khususnya edukasi dengan munculnya “priyayi baru” dari pribumi dengan dibukanya sekolah-sekolah di Hindia Belanda dan pengiriman siswa-siswa pribumi ke Belanda, pengaruh ini sangat kuat pada tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan kemerdekaan Indonesia khususnya pada kelomok “muslim modernis”.

5. Era Indonesia. Dimulai dari Periode Kebangkitan Nasional pada awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi-organisasi, lembaga pendidikan, media pers yang membangkitkan kebangsaan dan persatuan Indonesia yang bercita-cita kemerdekaan Indonesia yang terwujud dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang bisa disebut Hari AntiDiskriminasi yang mengakui satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945. Puncak dari era ini adalah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Lahirnya Konstitusi Indonesia: UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui proses yang panjang dan perubahan sejak Juni-Agustus 1945 (melewati Piagam Jakarta dan lain-lain

sebagainya). Prinsip-prinsip penting yang lahir dari periode ini adalah: (1) kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, (2) Pancasila sebagai dasar negara, (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, (5) Bhinneka Tunggal Ika.

Lima karakter yang berasal dari pengaruh kawasan geografis:

1. Pengaruh etnis atau suku bangsa yang terindentifikasi berdasarkan persamaan garis keturunan, ras, bahasa, agama, budaya, perilaku dan ciri-ciri biologis. Identitas etnis yang kuat apabila mendiami suatu wilayah khusus (misal pulau). Etnis akan mencair kalau tinggal di kawasan yang majemuk dan terjadi percampuran, misalnya di wilayah urban dan perkotaan. Etnisitas tidak selalu "asli" karena sering hasil dari interaksi dan hasil dari pengaruh yang berasal dari luar kelompok dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok (misalnya ada etnis hasil dari "campuran": Betawi) salah satu faktor

yang berpengaruh pada etnisitas adalah kolonialisme yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengotak-kotakkan warga jajahan ke kelompok etnis dan ras, dan masih bertahan hingga sekarang. Salah satu contoh yang disebut "etnis Jawa" di mana mereka berada? Padahal "Jawa Solo" dan "Jawa Jogja" diakui berbeda, apalagi dengan Banyumasan, pesisir atau dengan Jawa Timur. Jumlah etnis di Indonsia lebih dari 1000 suku, yang mayoritas telah mengalami percampuran dan pengaruh dari luar. Suku yang masih berusaha mempertahankan "kemurnian" baik dari sisi keturunan, keyakinan, bahasa, budaya, prilaku disebut masyarakat adat.

2. Pengaruh budaya dari kawasan yang sekarang disebut "Asia Tenggara" yang dimulai sejak era-pra sejarah, saling pengaruh datang melalui pesisir-pesisir yang bisa disebut kebudayaan maritim, perpindahan penduduk, kemiripian tradisi keyakinan, agama, sastra, adat yang

menujukkan “satu rumpun Asia Tenggara” yang disebut sebagai “Peradaban Pesisir” (Adrian Vickers, 2009). Pengaruh kuat dari Champa (Vietnam sekarang) terhadap gelombang islamisasi era Wali Sanga (abad ke-15 M). Kemiripan adat dan bahasa dalam satu suku bangsa (misalnya suku Melayu di Sumatera, Malaysia, Brunei, dan Patani di Thailand Selatan). Bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia setelah sebelumnya menjadi *lingua franca* di Nusantara.

3. Pengaruh budaya dari kawasan India dan kawasan “Anak Benua India” yang disebut Asia Selatan. Peradaban India memiliki pengaruh terhadap kawasan Nusantara, baik dari agama, sastra, bahasa dan budaya yang terwujud dalam Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha, peninggalan candi-candi, dan adat istiadatnya yang masih melekat dalam masyarakat saat ini. Anak Benua India memiliki pengaruh terhadap datangnya Islam ke Nusantara, seperti

Gujarat, Malabar, Sailan (Srilangka), Bangla (Bangladesh).

4. Pengaruh dari kawasan Tiongkok. Kawasan Tiongkok yang memiliki hubungan dagang dengan Nusantara sejak abad ke-3 M yang warisannya masih bisa kita saksikan saat ini, dari agama Buddha dan Islam (adanya para juru dakwah Islam awal di Nusantara berasal dari Tiongkok), peninggalan bentuk arsitektur (pada masjid-masjid kuna; Masjid Demak, Masjid Kasepuhan Cirebon, Masjid Kudus), budaya dan adat istiadat.

5. Pengaruh budaya dari kawasan Arab, Persia dan Turki. Ini tampak pada aspek agama dan budaya yang menjadi teori masuknya Islam ke Nusantara dengan versi: dari tanah Arab dan Persia. Tanah Arab yang dimaksud, Haramayn (Makkah, Madinah), Mesir, dan Hadramaut (Yaman). Pengaruh Persia dalam bentuk budaya dan aliran agama Syiah. Sementara Turki melalui Kerajaan Utsmani dengan Kerajaan Aceh dan Demak

yang puncaknya perlawanan terhadap Kolonialisme di Nusantara, khususnya terhadap Portugis.

Tidak ada istilah yang tepat untuk menunjukkan keragaman identitas di Nusantara—baik dari pengaruh sejarah dan kawasan—selain istilah *bhinneka*. Nusantara adalah berbeda-beda, beraneka-ragam. Nusantara tidak mengenal identitas yang tunggal, identitas Nusantara adalah bhinneka.

Corak Keislaman Nusantara

Corak keislaman yang tidak tunggal di Nusantara, telah melahirkan sejumlah teori masuknya Islam dari asal-asal yang berbeda. Paling tidak ada 4 teori asal-usul masuknya Islam ke Nusantara seperti yang dirangkum oleh Agus Sunyoto dalam *Atlas Wali Songo*.

1. Teori India (Gujarat, Malabar, Deccan, Coromandel, Bengal) hal ini berdasarkan asumsi persamaan madzhab Syafii, batu-batu nisan dan kemiripan tradisi dan arsitektur India

dengan Nusantara. (JP Mosquette, C. Snouck Hurgronje, S.Q. Fatimy)

2. Teori Arab (Mesir dan Hadramaut Yaman), berdasarkan persamaan dan pengaruh madzhab Syafii. (John Crawfurd, Naguib Al-attas)

3. Teori Persia (Kasan, Abarkukh, Lorestan), berdasarkan kemiripan tradisi dengan muslim Syiah, seperti Peringatan Asyura (10 Muharram), mengeja aksara Arab *jabar (fathah), jer/zher (kasrah), fyes (dhammah),* pemuliaan terhadap keluarga Nabi Muhammad Saw (Ahlul Bayt) dan keturunannya. Penyebutan kata, rakyat (dari ra'iyyah), masyarakat (musyawarah), serikat (syarikah). (Husein Djajadiningrat, Hasjmi, Aboe Bakar Atjeh)

4. Teori Cina yang berdasarkan asumsi pengaruh budaya Cina dalam sejumlah kebudaaan Islam Nusantara, dan sumber kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang (De Graaf, Slamet Muljana).

Meskipun dipercaya Islam sudah tiba di Nusantara sejak abad ke-7 M dan ditemukan makam-makam sultan yang merujuk pada abad ke-12, khususnya di Aceh, namun Islam belum menjadi agama yang mayoritas dipeluk di Nusantara ini. Gelombang Islamisasi baru tampak pada abad ke-15 dari wilayah pesisir Jawa. Perubahan ini bukan karena motif ekonomi yang menjadi landasan pola perdagangan melalui jalur laut saat itu, atau bukan karena para penguasa sudah berubah agamanya maka rakyatnya ikut berubah, namun karena fenomena yang disebut sebagai "para sufi pengembara". Para sufi menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, menekankan kesesuaian dan kontinuitas Islam, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktik agama lokal. Kuncinya terletak pada subtansi dan karakter ajaran para sufi pengembara itu, tasawwuf.

> "Mereka (para sufi pengembara) berkelana ke seluruh dunia yang mereka kenal, yang secara sukarela hidup dalam kemiskinan; mereka sering berkaitan dengan kelompok-kelompok dagang atau kerajinan tangan, sesuai dengan tarekat yang mereka anut; mereka mengajarkan teosofi sinkretik yang kompleks yang

> umumnya dikenal baik orang-orang Indonesia; mereka menguasai ilmu magis, dan memiliki kekuatan yang menyembuhkan; mereka siap memelihara kontinuitas dengan masa silam, dan menggunakan istilah-istilah dan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dalam konteks Islam." (Azra: 2005, 14-15).

Dalam pengamatan lain Azra—dengan meminjam istilah Nock—menggunakan istilah "adhesi" daripada "konversi" sebagai fenomena Islamisasi masyarakat Nusantara pada periode ini. "Adhesi" yakni perubahan keyakinan pada Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang lama, sedangkan "konversi" mengisyaratkan perubahan yang total dan ketertundukan yang penuh pada Islam dengan menyingkirkan anasir-anasir lokal. Sebagai seorang "modernis" Azra menambahkan bahwa "Wali Sanga di Jawa mengenalkan Islam kepada penduduk lokal bukan dalam bentuk yang ekslusivitas profetik, melainkan umumnya dalam bentuk kompromi-kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang mapan yang banyak diwarnai takhayul atau kepercayaan-kepercayaan animistik lainnya. Dalam banyak kasus,

mereka menarik banyak orang untuk memeluk Islam dengan menggunakan jimat, pesona ilmu kesaktian dan trik-trik supernatural lainnya. Azra: 2002, 20-21).

Wali Sanga, Islam Sufistik dan Nusantara

Menurut Agus Sunyoto kesuksesan islamisasi di tanah Jawa pada abad ke-15 H dengan kedatangan rombongan muslim dari Champa, Raden Rahmat (Sunan Ampel) sekitar tahun 1440 yang memiliki bibi yang diperistri Raja Majapahit. Selanjutnya Islamisasi dimulai melalui jaringan para juru dakwah (wali) secara terorganisir dan sistematis, mereka memanfaatkan jaringan kekeluargaan, kekuasaan, kepiawaian mereka merebut simpati masyarakat. Kekuatan gerakan ini terletak pada: (1) ajaran sufisme, (2) asimilasi dalam pendidikan, (3) dakwah lewat seni dan budaya dan (4) membentuk tatanan masyarakat muslim Nusantara.

(1) Sufisme yang dimaksud adalah ajaran *wahdatul wujud* (kesatuan wujud) dan *wahdatus syuhud* (kesatuan pandangan) sehingga tidak terlalu asing dengan kepercayaan lokal yang mengakui banyak arwah di mana-mana, dan dalam memandang benda-benda

alam terpengaruh aura ketuhanan. (2) Asimilisasi pendidikan adalah pembangunan pesantren yang mendidik generasi-generasi pelanjut dakwah Islam, dalam konteks Raden Rakhmat (Sunan Ampel) terlihat peran anak dan muridnya dalam perkembangan Islam di Jawa, seperti Sunan Bonang dan Raden Fatah sebagai sultan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak.

(3) Gerakan dalam seni dan budaya dalam bentuk wayang yang disesuaikan dengan kisah dan nafas Islam, juga keterlibatan para wali dalam menyusun tembang, kidung, musik, hingga permainan anak-anak yang bernafaskan Islam. Asimilasi juga tampak pada arsitektur, misalnya bentuk atap masjid yang berundak tiga (simbol: iman, islam, ihsan) merupakan perubahan terhadap atap berundak tujuh yang dikenal dalam bangunan Hindu. Arsitektur Hindu masih tampak pada gerbang-gerbang masjid, juga ornamen-ornamen yang berasal dari kesenian Tionghoa.

(4) Tatanan masyarakat muslim dimulai dari kediaman wali yang menjadi pusat masyarakat, dengan masjid dan pesantren serta sebagai pemimpin dan sosok yang dituakan dan dihormati di masyarakat itu. Pengaruh

wali yang nantinya terlihat pada kyai, tidak hanya pada dunia pesantren, namun juga pada masyarakat sekitarnya.

Selain sufisme Wali Sanga yang berpengaruh pada Jawa, sufisme juga sangat berpengaruh terhadap gerakan islamisasi di kawasan-kawasan lain di Nusantara. Pada abad 16, Buton menerima Islam yang toleran dengan tradisi lokal. Proses Islamisasi di Gowa (1602) yang dilakukan oleh Khatib Bungsu yang tasawwufnya bercorak wahdatul wujud. Demikian pula di Banjar, Kalimantan Selatan, Palembang, Sumatera Selatan (Miftah Arifin: 2015).

"Sintesis Mistik"

Proses islamisasi terbatas dan bukan arabisasi menjadi kunci sukses gerakan dakwah para Wali Sanga ini menghasilkan fenomena keislaman yang unik dan khas yang disebut oleh Ricklefs sebagai "Sintesis Mistik". Ajaran Islam dan kepercayaan lokal tidak berhadap-hadapan dan bertentangan dalam pola kepercayaan lokal (tesis) dan ajaran Islam sebagai anti-tesis, namun ada upaya untuk menemukan sintesis dari keduanya, inilah

cikal-bakal dari Islam Nusantara. Dalam menerangkan "Sintesis Mistik" ini, menurut Ricklefs ada tiga pilar utama: (1) kesadaran identitas Islami yang kuat: menjadi orang Jawa berarti menjadi muslim; (2) pelaksanaan lima rukun ritual dalam Islam: syahadat, shalat lima kali sehari, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu; (3) terlepas dari kemungkinan munculnya kontradiksi dengan dua pilar pertama, penerimaan terhadap realitas kekuatan spiritual khas Jawa seperti Ratu Kidul, Sunan Lawu (roh Gunung Lawu yang pada dasarnya adalah dewa angin) dan masih banyak lagi makhluk adikodrati yang lebih rendah. Intinya telah terjadi adaptasi dan akulturasi antara kepercayaan terhadap ajaran Islam dan kepercayaan lokal yang terwujud juga dalam praktik sehari-hari.

Meskipun sering dibedakan antara "Islam Pedalaman" dan "Islam Pesisir" namun "Sistesis Mistik" ini tetap dikenal dalam dua masyarakat itu, kepercayaan pada arwah dan makhluk-makhluk gaib misalnya, Ratu Laut Selatan dikenal oleh masyarakat Pantai Selatan dan tidak dikenal oleh Pesisir Utara, namun bukan berarti masyarakat Pesisir Utara tidak mengenal roh-roh di

Laut Utara, mereka tetap meyakini ada. Peziarahan yang dikenal di Jalur Selatan adalah makam-makam yang tidak jelas identitas keislamannya, sementara tujuan-tujuan peziarahan di Pesisir Utara adalah para wali dan tokoh-tokoh yang dikeramatkan (*Islam Pesisir*, Nur Syam: 2005).

"Neo-Sufisme" Vs "Sintesis Mistik"

Namun dalam perkembangan selanjutnya, mulai abad ke-17 M muncul fenomena pembaruan yang bisa dipahami semacam upaya pemurniaan terhadap "Sistesis Mistik" ini. Gejala ini berupa ortodoksi keislaman dalam bentuk "neo-sufisme" yang dipengaruhi telaah hadits, pengaruh ilmu syariat (dalam hal ini fiqih) yang merupakan bentuk lain dari "sintesis baru" antara tasawwuf dan syariat yang telah didamaikan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* setelah sebelumnya dua aspek ini terjadi pertentangan dalam kasus misalnya Al-Hallaj dan Suhrawardi al-Maqtul, dua tokoh sufi yang dihukum mati oleh para ulama fiqih dengan tuduhan melanggar syariat. Dan untuk kasus tanah Jawa, munculnya Syaikh Siti Jennar yang dikabarkan dihukum mati oleh para Wali Sanga karena

mengajarkan tasawwuf yang bertentangan dengan syariat.

Pada periode ini "Sintesis Mistik" mulai dirongrong dengan "sintesis baru" yang berasal dari "kawin-silang" antara tasawwuf dan syariat. Sebelum ini Nusantara tersebar "Sintesis Mistik" antara tasawwuf yang bisa disebut "falsafi" dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Tokoh-tokoh gerakan "Neo-Sufisme-Syariat" ini berasal dari para pelajar yang baru datang dari Haramayn (Makkah dan Madinah). Padahal sebelumnya para pelajar itu ke Haramayn membawa "sistesis mistik" dari daerah masing-masing akan tetapi di Haramayn menjadi semaca "melting pot" (panci pelebur) dari tradisi-tradisi "sintesis mistik" lama dan terbentuklah suatu "sistesis baru" yang condong pada "tradisi besar" (neo-sufisme: sintesis tasawwuf dan syariat). Nuruddin Ar-Raniri di Aceh mulai melarang ajaran-ajaran Hamzah Fansuri dan Abd Samad al-Sumatrani, demikian pula di Jawa Tengah dengan kasus Kyai Mutamakkin yang diserang oleh Ketib Anom Kudus. Abd Shamad al-Palimbani "memurnikan" ajaran tasawwuf di Palembang, Muhammad Arsyad Banjari di Kalimantan Selatan, Yusuf al-Makassari di Sulawesi Selatan, dan Sayyid Alawi di Buton.

Namun yang perlu dicatat, perubahan dan pembaruan ini lebih banyak dalam proses damai, gradual, dan tetap terbatas, tidak dalam konteks yang radikal, ekstrim dan menggunakan kekerasan (kecuali contoh kasus Syaikh Siti Jennar di Jawa dan Haji Abd Hamid di Kalimantan Selatan yang lebih kental karena alasan politik). Perubahan ini berlangsung dalam jaringan para ulama yang melakukan pembaruan-pembaruan yang tidak radikal namun efektif dalam pola relasi dan pengaruh kyai terhadap santri-santrinya, antara syaikh dan para muridnya dalam tarekat, pengajaran-pengajaran kitab-kitab standar yang berhaluan mendamaikan tasawwuf dan syariat yang dipelajari di pesantren-pesantren dan masyarakat dengan menyingkirkan kitab-kitab lama (kitab-kitab yang berhaluan tasawwuf *wahdatul wujud*).

Polarisasi "Putihan" Vs "Abangan"

Fenomena ini berlangsung berabad-abad sehingga nantinya muncul polarisasi dua aliran dalam masyarakat, yang dikenal sebagai "putihan" dan "abangan". Yang pertama, ingin terus melakukan perubahan dari yang bertahap hingga yang radikal, dan sering disebut kalangan santri. Sedangkan kedua tetap ingin menekankan kontiuitas dengan lokalitas dan longgar

dalam bersyariat. Sikap politik terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu tanda terpenting dari perbedaan dua golongan ini.

Kolonialisme Belanda ikut memperuncing polarisasi "putihan" dan "abangan" ini dengan kebijakan politiknya. Golongan yang sering disebut "priyayi" yang lebih dekat dengan kelompok "abangan" dari sisi kepercayaan dan tradisi, namun berbeda dalam kelas sosial, memperoleh perlakuan-perlakuan yang istimewa dari Belanda. Sementara kalangan "putihan" yakni kalangan santri tetap dalam sikap yang bermusuhan terhadap Belanda. Perang Dipanegara dianggap sebagai perlawanan kaum "putihan".

Fenomena polarisasi "abangan" dan "putihan" tidak khas Jawa saja, bisa ditemukan di luar Jawa, antara kelompok "adat" dan "santri". Dalam banyak kasus di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan, dan NTB, kalangan "adat" kalau tidak berkolaborasi, mereka tidak menunjukkan sikap yang bermusuhan dengan pemerintah kolonial Belanda

Golongan yang ingin melakukan perubahan ekstrim adalah Kaum Padri di Sumatra Barat yang dimulai dari Tuanku Nan Renceh yang mendapat dukungan dari tiga

haji yang kembali dari Makkah pada 1218/1803: Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Makkah oleh kaum Wahhabi. Karena itu cukup beralasan jika mereka dianggap dipengaruhi ajaran-ajaran Wahhabi yang menginginkan perubahan secara radikal di wilayah Minangkabau.

Kelompok ini meneriakkan jihad pada kaum muslim lain yang tidak mau mengikuti ajaran mereka (persis seperti yang dilakukan Kaum Wahhabi di Najd dan Hijaz) akibatnya perang saudara meletus di tengah masyarakat Minangkabau, surau-surau yang dianggap kubu-kubu bid'ah diserang dan dibakar hingga rata dengan tanah, dan inilah yang memancing campur tangan Belanda. Pecahlah Perang Padri yang baru berakhir 1830 M. (Azra: 2005, 371). Peristiwa ini memberikan pelajaran bagi kita dampak dari gerakan pembaruan yang radikal dan ekstrim, bukan Islam makin tersebar dan kuat, tapi malah memantik perang saudara antara muslim.

Sebagai penutup dari bagian ini, saya ingin mengutip pendapat KH Abdurrahman Wahid tentang model hubungan Islam dengan kekuasaan dan budaya lokal yang terbagi menjadi 4 model di Nusantara:

Pertama, model Aceh yang mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang kuat dan besar, di sana adat ditundukkan oleh syariat Islam yang ditafsirkan sesuai kitab-kitab fiqih yang diakui. *Kedua,* model Minangkabau, dalam hal kekuatan adat dan syariat sama-sama berimbang yang termaktub dalam falsafah di sana "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". *Ketiga* model Jawa yang mengenal relasi multikratonik, terjadi keragaman pola kehidupan antara negara (kraton-kerajaan) dan pesantren. Selama pihak kedua mengakui kraton sebagai pusat kekuatan mereka dapat menjalankan progam-program seperti yang zaman sekarang disebut LSM (kelompok civil society). Pesantren basis santri sementara Keraton simbol Kejawen. *Keempat,* model Gowa yang merupakan asimilasi antara adat-adat pra-Islam dan Islam secara damai. Budaya-budaya lokal tetap menjadi identitas penting dalam berislam.

Model *pertama*, syariat mengalahkan budaya (islamisasi total), model *kedua*, syariat dan budaya berdampingan dan otonom, ini ditunjukkan masih berlakunya prinsip matrilineal (keturunan dari garis ibu) di Minangkabau, model *ketiga*, "sintesis mistik" antara syariat dan budaya, model *keempat*, budaya yang berbalut syariat.

BAB III

TIGA ALIRAN PEMIKIRAN ISLAM NUSANTARA

Aliran "Tradisionalis" dan "Modernis"

Pada paroh awal abad ke-20 terjadi persaingan antara kubu yang sering disebut "modernis" dan "tradisionalis" yang secara sederhana kubu pertama ingin melakukan perubahan terhadap aspek-aspek lokal dan tradisi, sedangkan kubu kedua yang ingin mempertahankan kesinambungan (kontiuitas) dengan tradisi dan budaya lokal. Kubu pertama terwakili oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), kubu ini menentang ritual-ritual seperti tahlil, selamatan, sesaji, ziarah kubur wali, *tabarruk* (ngalap berkah), *tawassul* (melalui perantara) yang dianggap syirik, bid'ah dan khurafat, serta menolak madzhab fiqih dan menginginkan merujuk langsung pada Al-Quran dan Hadits. Semua hal yang diserang oleh kelompok "tradisionalis" dijalankan oleh kelompok "tradisionalis" (dan juga "abangan"). Merasa menjadi sasaran, sekaligus kemunculan kekuatan

Wahhabi di Makkah dan Madinah, kubu "tradisionalis" membangun organisasi Nahdlatul Ulama (1926) yang berasal dari jaringan pesantren-pesantren yang saat itu dominan di Jawa.

Inilah persaingan di kalangan "putihan"/"santri", kejadian ini seperti mengulangi sejarah kritik kalangan "neo-sufisme" (sintesis tasawwuf-syariat-hadits) terhadap kalangan "sintesis mistik" (sintesis kepercayaan lokal-tasawwuf "falsafi", "panteistik") pada abad ke-17. Apabila pada abad-abad sebelumnya "neo-sufistik" bisa mengambil alih kendali keislaman dari kubu "sintesis mistik" dengan berdirinya pesantren-pesantren dan diajarkannya kitab-kitab kuning yang sesuai dengan ajaran Islam versi mereka, namun pada era ini kalangan "modernis" ini (yang bisa disebut "neo-salafi") mendapatkan perlawanan yang tangguh dari kalangan "tradisionalis" ("neo-sufistik") dan tidak mampu menggeser peran kubu ini, karena kubu "tradisionalis" telah memiliki modal sosial mereka sudah tertanam kuat dalam masyarakat.

“Tauhid Sosial” KH Ahmad Dahlan dari “Modernis”

Meskipun kalangan “modernis” bisa dipandang tidak toleran dan tidak mengapresiasi budaya lokal, namun gerakan ini tidak kalah penting dalam proses gerakan dakwah Islam di Indonesia. Ajaran Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah menekankan pada aspek kepedulian sosial yang terwujud dalam pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin (membuat panti asuhan anak yatim). Gerakan ini terinspirasi dari surat Al-Maa’un, bahwa pendusta agama adalah mereka yang menelantarkan anak yatim dan tidak memberi bantuan pada orang miskin. Ajaran ini dikenal nantinya sebagai “Tauhid Sosial”. Keberagamaan model ini juga simpel, egaliter dan mementingkan kemajuaan dan modernitas, sehingga memperoleh pengikut yang lumayan.

Di pihak seberang, kelompok “tradisionalis” ingin merespon terhadap kalangan “modernis” agar mereka bisa menghormati dan toleran pada keyakinan dan ritual yang diamalkan oleh kalangan “tradisionalis”. Serangan-serangan kubu “modernis” memang salah sasaran kalau dianggapnya ritual-ritual kubu “tradisionalis” bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, karena

kubu ini telah melakukan "pemurnian" melalui fenomena "neo-sufisme" di atas dan rujukan mereka adalah kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam yang mumpuni keilmuannya.

Pembaruan dari Kalangan "Tradisionalis"

Pada dasarnya kalangan "tradisionalis" tidak anti pembaruan. Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari (Rois Akbar NU pertama) telah melakukan inovasi sejak tahun 1929, seorang kiai muda berpendidikan Belanda, Kiai Moh. Ilyas diangkat menjadi direktur madrasah dan ia memasukkan mata pelajaran umum seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi, abjad latin dalam kurikulumnya (Aboebakar 1957: 85).

KH Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU adalah sosok yang dikenal modern dan dinamis. Sejak mukim di Makkah, Kiai Wahab aktif di Sarekat Islam (ormas politik yang sering disebut "modernis"), bekerjasama dengan tokoh nasionalis Soetomo (pendiri Boedi Oetomo, 1908) dalam kelompok studi, *Islam Studie Club*. Pada tahun 1916, Kiai Wahab mendirikan madrasah yang bernama *Nahdlatul*

Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang menunjukkan patriotisme dan kebangsaan dari semangat keislaman. Tahun 1918 Kiai Wahab membentuk *Nadhatut Tujjar* (Kebangkitan Kaum Pedagang) dalam bentuk koperasi pedagang. Madrasah baru bernama *Tashwirul Afkar* didirikan tahun 1919 untuk menyediakan tempat bagi pelatihan anak-anak muda belajar dan mengaji sebagai "sayap" untuk membela kepentingan kalangan "tradisionalis".

Persaingan kubu "modernis" dan "tradisionalis" meruncing dalam sidang-sidang Kongres Al-Islam sejak tahun 1922, 1926. Akhirnya untuk membela hak kebebasan meyakini ajaran agama, menuntut toleransi dari pihak yang menyerang baik dari kalangan "modernis" di Tanah Air dan Kekuatan Saudi-Wahhabi yang menguasai Haramayn (Makkah dan Madinah) yang mulai melarang ritual-ritual kalangan tradisional, melarang tarekat, menghancurkan kuburan para sahabat dan lain-lain sebagainya, kalangan "tradisionalis" mendirikan Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926.

Namun persaingan ini tidak menutup adanya persatuan dengan masih adanya kekuatan penjajah Belanda waktu itu. Saat pemerintah Kolonial Belanda mencampuri

urusan Islam, misalnya dengan menarik warisan dari Pengadilan Agama tahun 1931 dan diberlakukannya hukum Adat, NU termasuk yang protes keras. Kesewenang-wenangan ini membuat Kiai Hasyim pendiri NU, tahun 1935 mengajak persatuan umat Islam, khususnya kepada kalangan yang menyebut sebagai "pembaharu".

> "Wahai ulama-ulama! Kalau kamu lihat orang berbuat suatu amalan berdasar kepada qaul (pendapat) imama-imam yang boleh ditaqlidi (diikuti), meskipun qaul itu marjuh (tidak kuat alasannya) jika kamu tidak setuju, jangan kamu cerca mereka, tetapi berilah petunjuk dengan halus! Dan jika mereka tidak sudi mengikuti kamu, janganlah mereka dimusuhi. Kalau kamu berbuat demikian, samalah kamu dengan orang yang membangun sebuah istana dengan menghancurkan lebih dahulu sebuah kota."

Seruan ini tidak hanya ajakan untuk bersatu, namun sekali lagi penegasan untuk saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing, serta menghindari efek-efek negatif seperti metafora yang

digunakan Kiai Hasyim "membangun istana dengan menghancurkan sebuah kota". Kubu "modernis" dan "tradisionalis" bersatu dalam konfederasi MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia) tahun 1937. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan Jepang dan diganti dengan Masyumi (Madjlis Syuro Muslimin Indonesia) yang menyatakan siap membantu kepentingan Jepang. Hanya NU dan Muhammadiyah yang diakui secara sah oleh penjajah dan diperbolehkan menjadi anggota Masyumi, mereka memimpinnya bersama-sama. Pada Agustus 1944 Kiai Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai Ketua *Shumubu*, Kantor Urusan Agama buatan Jepang. Tahun itu juga Kiai Wahid Hasyim putra Kiai Hasyim berhasil membujuk Jepang memberikan latihan militer khusus santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan sendiri: Hizbullah dan Sabilillah.

Islam Bung Karno sebagai "Sintesis" dari Aliran "Tradisionalis" dan "Modernis"

Di antara persaingan kubu "tradisonalis" dan "modernis" ini yang mempermasalahkan soal-soal seperti wajibkan niat *ushalli* dalam shalat, ziarah kubur, tahlil, tabarruk (ngalap berkah), sesajen, pandangan-pandangan

keislaman Bung Karno bisa dilihat sebagai "sintesis" dari dua kubu ini. Bung Karno berasal dari kalangan abangan, ayahnya penganut theosofi, ide-idenya fokus pada soal-soal kebangsaan, namun pendidikan dan lingkungan Bung Karno bisa dikaitkan dengan kalangan "modernis", apalagi ia mengaku sebagai anggota Muhammadiyah. Dalam periode ini, Bung Karno seakan-akan ingin mengajak dua kubu baik "tradisionalis" dan "modernis" ini untuk memikirkan kembali Islam dalam konteks yang lebih luas: kebangsaan, kemajuan dan masa depan sebuah bangsa, bukan masalah-masalah khilafiyah yang artifisial saja.

Dalam pembuangan di Ende, Flores (1934-1938), Bung Karno menunjukkan minatnya mempelajari Islam, dalam surat-surat yang ia kirim ke A Hassan, pendiri Persatuan Islam, ia menuangkan ide-idenya tentang Islam, yang ia lanjutkan dalam tulisan-tulisan baik di Suluh Indonesia Muda, Pemandangan, Pandji Islam, Pedoman. Bung Karno melancarkan kritik baik kepada kubu "modernis" dan "tradisionalis" sekaligus. Di Indonesia benar ada Kaum Muda seperti Muhammadiyah dan Persis tetapi seruan rasionalisme tidak sering ditekankan. Maka kritik ini menyangsikan

kubu yang sering disebut "modernis" benar-benar modern, karena tidak adanya rasionalisme dalam pemikiran mereka.

> "Perbedaan antara kaum muda dan kaum tua di sini hanyalah, bahwa kaum tua menerima tiap-tiap keterangan dari tiap-tiap otoritas Islam, walaupun tidak tersokong oleh dalil Quran dan Hadis, sedang kaum muda hanyalah mau mengakui sah sesuatu hukum, kalau ternyata tersokong oleh Quran dan Hadis....tetapi interpretasi Quran dan Hadis itu, cara menerangkannya...belumlah rasionalistis 100%, belumlah selamanya dengan bantuan akal 100%...mereka tidak selamanya mengakurkan pengertiannya itu dengan akal yang cerdas, tetapi masih mengasih jalan kepada percaya buta belaka...Asal tertulis dalam Quran, asal tertera di dalam Hadis yang sahih, mereka terimalah walaupun kadang-kadang akal mereka tak menerimanya."

Demikianlah kritik Bung Karno, baik yang "tradisionalis" (kaum tua) dan "modernis" (kaum muda) masih "percaya buta belaka" dan tidak menggunakan rasio dan akal yang cerdas.

Dalam tulisan-tulisan itu, beberapa pesan keislaman Bung Karno yang patut dicermati:

1. Islam sebagai elan persatuan nasional dalam tulisannya "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" (Suluh Indonesia Muda, 1926)

2. Islam yang menekankan rasionalitas, sains (ilmu pengetahuan) dan penyelidikan, dan menolak percaya buta (taklid). "Orang tak dapat memahami betul Quran dan Hadis kalau tak berpengatahuan umum...bagaimana orang bisa mengerti betul firman Tuhan segala barang sesuatu dibikin oleh-Nya "berjodo-jodoan" kalau tak mengetahui biologi, tau mengetahui elektron, tak mengetahui positif, negatif...." Bung Karno menyebut ilmu biologi, arkeologi, astronomi, sejarah

3. Islam yang menekankan kemajuan dalam artikel yang ia tulis: "Islam *is progress*,--Islam itu kemajuan...kemajuan karena fardlu (wajib)... karena sunah, tetapi juga kemajuan karena diluaskan dan dilapangkan oleh jaiz atau mubah yang lebarnya melampui batas-batasnya zaman"

Islam untuk kemajuan yang menekankan pada aspek kebolehan (mubah, jaiz) yang bisa melampui zaman, bukan untuk melarang-larang dan mengharamkan.

4. Islam yang mengakui agama-agama yang lain dan pentingnya toleransi dan demokrasi. Pemaksaan suatu negara Islam menurutnya bertentangan dengan demokrasi dan dunia modern dan merupakan bentuk kediktatoran, "kalau mereka tidak terima konstitusi Islam, apakah mau paksa mereka, dengan menghantam Tuan punya tinju di atas meja, bahwa mereka mesti ditundukkan kepada kemauan Tuan itu? Ai, Tuan mau main diktator, mau paksa mereka dengan senjata bedil dan meriam?...zaman sekarang zaman moderen, dan bukan zaman basmi-basmian secara dulu"

5. Islam yang mengakui persamaan dan kemuliaan manusia "...Tidak ada satu agama yang menghendaki kesamarataan daripada Islam" Bung Karno menolak pembedaan manusia berdasarkan keturunan, seperti sayyid yang merupakan bentuk feodalisme yang merupakan

penjajahan manusia terhadap manusia yang lain. Dia juga menolak fasisme dan rasialisme seperti yang dilakukan Hitler di Jerman. Bung Karno menentang kalau ada larangan transfusi darah berdasarkan perbedaan agama dengan alasan non-muslim "najis": "benarkah Quran ada mengatakan begitu, tetapi najis apanya? Najis tubuhnya kah? Najis darahnya kah? Tidak!..najis pahamnya...dan tentang darah yang mengalir di dalam tubuh mereka darah itu tidak najis, tidak kotor.."

6. Menekankan pada subtansi ajaran Islam "ruh dan semangat Islam, api Islam" bukan pada aspek-aspek simbolnya yang ia sebut sebagai "agama celak" dan "agama sorban" atau "abu Islam".

7. Islam yang lentur, luwes, memudahkan dan cocok dengan kemajuan. "Hukum yang jempol haruslah seperti karet, dan kekaretan ini adalah teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam... itu bisa cocok dengan semua kemajuan."

8. Islam yang membebaskan dan anti penindasan. Bung Karno menentang tabir yang menutupi perempuan dalam pertemuan, karena bagi dia “tabir adalah lambang perbudakan kaum perempuam” dalam wawancara ia menegaskan “saya anggap tabir sebagai simbol-simbolnya perbudakan perempuan, keyakinan saya ialah Islam tidak mewajibkan tabir itu. Islam memang tidak mau memperbudakkan perempuan.”

9. Islam yang mengakui perbedaan dua otoritas, agama dan politik. Dalam membedakan dua otoritas ini Bung Karno menulis tentang Mustafa Kemal Attaturk di Turki, “Bagi kita agama Islam adalah urusan kita sendiri dan bukan urusan pemerintah”, “manakala agama dipakai untuk memerintah, ia selalu dipakai alat penghukum di tangannya raja-raja, orang-orang zalim dan orang-orang tangan besi.”

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pengesahan UUD 1945 18 Agustus 1945 merupakan persatuan antara kalangan yang disebut “putihan/santri” baik yang “modernis” atau yang “tradisionalis” dengan kalangan “abangan” dari kubu “nasionalis”.

Ketegangan ini mereda setelah terlibat polemik soal dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta selama Juni-Juli 1945. Atas nama persatuan, kebangsaan, dan kemerdekaan dari penjajahan, polarisasi sosial dan politik ini bisa diredam, namun tidak benar-benar hilang, yang nantinya semakin meruncing pada Pemberontakan PKI 1948 dan benar-benar pecah dan konflik saudara, antara "abangan" dan "putihan/santri" pada Tragedi 1965-1966. Polarisasi ini meneguhkan identitas dan tradisi masing-masing. Misalnya golongan "abangan" identik dengan kesenian rakyat dan lokal (tayub, ludruk, jaranan, wayang, nyadran) sementara kalangan "santri" dengan kesenian yang "bernafaskan ajaran Islam", shalawatan, barzanji, kasidahan, gambus, terbangan.

BAB IV

DEFINISI DAN URGENSI ISLAM NUSANTARA

Setelah menguraikan sejarah di atas, saya ingin memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bisa digunakan untuk membuat semacam definisi dan karakter Islam Nusantara. Pada periode Wali Songo kita menemukan fenomena "Sintesis Mistik" yang merupakan islamisasi dalam arti berkolaborasi dengan kepercayaan dan budaya lokal, yang kemudian datang "Neo-Sufisme" yang orientasi islamisasinya lebih kepada syariat.

Pada awalnya, dakwah Islam menekankan pada aspek kontinuitas antara ajaran Islam dengan budaya lokal, alih-alih melakukan perubahan terhadap budaya lokal, periode ini malah mengadopsi dan mengafirmasi budaya lokal dalam sistem ajaran. Hal ini didukung dengan ajaran keislaman zaman itu yang sangat lentur, lebih pada aspek subtansi dan jiwa keislaman, serta paham tasawwuf yang disebut *wahdatul wujud,*

-*wujudiyah, hulul* yang dirasa sesuai dengan keyakinan lokal yang panteistik. Meskipun gerakan "Neo-Sufisme" melakukan perubahan pada masa-masa selanjutnya, tetap dalam ritme yang pelan dan tidak radikal, karena "Sintesis Mistik" tetap ada sampai sekarang.

Kemunculan golongan "modernis" (Kaum Muda) pada awal abad ke-20 yang melakukan perubahan-perubahan direspon dengan penolakan oleh golongan "Neo-Sufisme" yang sebelum era ini melakukan perubahan-perubahan, dan golongan ini disebut sebagai "tradisionalis" (Kaum Tua). Pada hakikatnya dari dua golongan kita bisa mengambil pelajaran, dari kalangan "tradisionalis" kita bisa belajar harmonisasi dan kontinuitas terhadap kearifan lokal, sementara dari kalangan "modernis" kita bisa mengambil pesan kemajuan dan perubahan yang dijalankan tanpa paksaan dan kekerasan. Dan kita, menemukan "sintesis" ajaran dari dua kubu ini pada pandangan-pandangan Bung Karno.

Dalam ranah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah:

1. Islam yang mengutamakan kesinambungan

dan kontinuitas dengan budaya lokal (kita bisa saksikan era Wali Songo).

2. Islam yang mampu menampilkan keragaman-keragaman melalui relasinya dengan anasir-anasir lokal, karena kita telah tahu, Nusantara sangat beragam, baik dari warisan sejarah maupun pengaruh geografis dan kawasan. Batasan di sini adalah "syariat Islam" (sesuai tafsir yang dianggap otoritatif), apabila sesuai dengan syariat akan diadopsi *(al-aadah muhakkamah:* adat adalah hukum*)*, bila bertentangan ada tiga sikap: (a) toleran (membiarkan dan menghormati asal tidak mengganggu, (b) membentuk subkultur [benteng] dalam masyarakat seperti: pesantren) atau (c) melakukan perubahan secara bertahap dan menjauhi kekerasan.

3. Islam yang melakukan perubahan dan pembaruan (transformasi) dengan mengedepankan perubahan yang terbatas, tidak radikal, ekstrim, menjauhi cara-cara kekerasan dan mencari "jalan tengah" "kompromi" dan "sintesis"

4. Islam yang bertransformasi sebagai kekuatan kebangsaan dan kemajuan (era Kemerdekaan Indonesia, khususnya ide-ide Bung Karno).

5. Jalur dakwah Islam Nusantara melalui: pendidikan, pelayanan sosial, kesenian dan budaya serta kegiatan-kegiatan kultural lainnya.

6. Karakter Islam Nusantara adalah moderat *(tawassuth)*, tidak ekstrim, dan tidak radikal, selalu mencari "jalan tengah" dan "sintesis".

7. Karakter Islam Nusantara adalah toleran *(tasamuh)* dan menjauhi fanatisme *(ta'ashshub)* dan kekerasan.

Islam Nusantara Atau Islam Indonesia?

Pada dasarnya dua istilah ini, "Islam Nusantara" dan "Islam Indonesia" tidak perlu dipertentangkan. Islam Nusantara memang mengesankan romantisme masa lalu, hal ini lumrah karena yang mengusungnya adalah kalangan tradisionalis yang tetap ingin melihat hal-hal yang positif dari masa lalu *(al-muhafadzah ala-l*

qadimi-s shalih). Sejarah Wali Sanga menjadi “imaji” bagi metode dakwah yang pernah sukses yang membuat gelombang Islamisasi di Nusantara melalui jalur yang damai, akomodatif, dan toleran, yang berbeda dari wilayah-wilayah lain di mana Islam datang melalui rangkaian penaklukkan meliter.

Istilah Nusantara adalah istilah budaya, bukan istilah yang cenderung “resmi” seperti “Indonesia”, ia merupakan istilah yang melekat dalam budaya dan terus hidup di tengah masyarakat, maka kalangan yang mengusung hal ini merupakan gerakan kultural bukan pemerintahan. Sebagai gerakan kultural, memang lebih tepat menggunakan istilah yang melekat dengan budaya dan bukan istilah resmi pemerintahan. Maka, gerakan Islam Nusantara bisa dipandang sebagai gerakan yang muncul di tengah masyarakat dan melalui budaya, bukan sebagai proyek pemerintahan dan kekuasaan, karena NU sudah ada dan eksis sebelum pemerintah Indonesia ada, dan NU pula yang ikut melahirkan Republik Indonesia ini.

Islam Nusantara juga membawa imajinasi kita pada keberagaman, perbedaan dan kemajemukan. Pada bahasan sebelum ini telah dijelaskan bahwa Nusantara

adalah kebhinnekaan yang tidak mengenal identitas yang tunggal. Penduduk Nusantara mewarisi paling tidak 10 karakter Nusantara yang beragam. Islam Nusantara adalah Islam yang multikultural seperti yang kita saksikan di bumi Nusantara, sementara Indonesia "menuntut" imajinasi kita pada persatuan. Padahal kita baru bisa bersatu, kalau sudah mengakui kita ini berbeda dan majemuk, serta memiliki kearifan untuk menerima segala hal kemajemukan itu, barulah kita akan bisa bersatu. Kita bisa bersatu dalam identitas nasional, namun yang tak boleh dinafikan: pemahaman dan ekspresi keislaman tetap lah majemuk dan beragam.

Islam Nusantara tidak hanya mengenal ikatan nasional saja, istilah Nusantara melintasi yang disebut "Nasionalisme Indonesia", karena Nusantara merujuk ke luar teritori Republik Indonesia saat ini. Ia merujuk ke Semenanjung Malaysia, seluruh Borneo (Kalimantan), Papua, juga tradisi yang disebut Melayu. "Islam Nusantara" adalah pengalaman keislaman seorang manusia dalam konteks Nusantara. "Bangsa Nusantara" lebih luas dari bangsa Indonesia dan Malaysia, serta Thailand saat ini.

KH Ahmad Shiddiq yang pernah menjabat Rais Aam PBNU yang sering dirujuk oleh penganjur Islam Nusantara pernah mengenalkan tiga model *ukhuwah* (persaudaraan): persaudaraan keislaman *(al-ukhuwwah al-islamiyah)*, persaudaraan kebangsaan *(al-ukhuwwah al-wathaniyah)* dan persaudaraan kemanusiaan *(al-ukhuwwah al-basyariyah)*.

Urgensi dan Relevansi Islam Nusantara

Mengapa Islam Nusantara penting untuk konteks saat ini?

Pertama, diperlukan cara pandang dan sikap keislaman yang mampu merawat dan menerima kebhinnekaan yang ada di Indonesia. Negeri ini memiliki 17.000 pulau dan 1200 suku bangsa yang menunjukkan keragaman yang luar biasa. Dari penelusuran apa yang disebut Nusantara, baik dari pengaruh sejarah maupun kawasan (10 karakter dan identitas Nusantara) menunjukkan tidak adanya identitas yang asli dan tunggal. Sehingga keislaman tampak sebagai akumulasi dari pengaruh-pengaruh tersebut dan terekspresi dalam konteks keragaman budaya. Tanpa cara pandang dan sikap

keislaman yang bisa merawat, maka negeri ini akan terpecah-belah dan hancur. Inilah alasan survival.

Kedua, Islam Nusantara adalah "titik temu" antara golongan "santri" dan golongan "abangan" dalam keberagamaan. Dua golongan ini merupakan kekuatan utama dalam persatuan negeri ini. Maka Islam Nusantara bisa menjadi jembatan yang mempertemukan dua golongan dalam konteks agama. Golongan abangan akan menerima citra keislamannya (yang selama ini mereka sering dituduh kurang Islam) sementara golongan santri akan makin menghormati keragaman budaya. Melalui sejarah kita menyaksikan persatuan dua golongan ini sangat berpengaruh menyelamatkan persatuan bangsa ini di saat-saat kritis, misalnya Kemerdekaan Indonsia, Konsituante, Pancasila Era Orde Baru dan Sidang MPR 1999-2000 dalam soal dasar dan bentuk negara. Maka tidak heran kalau Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan abangan langsung menyambut ide Islam Nusantara ini.

Ketiga, membendung kelompok dan gerakan yang ingin memaksakan kehendak di Indonesia, baik dari jalur politik ("islamis"), ormas dan kelompok-kelompok yang ingin menyeragamkan identitas Nusantara menjadi satu

agama menurut pemahaman mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini sering mengatasnamakan "islamisasi" padahal mereka melakukan "arabisasi", karena sasaran gerakan mereka adalah kelompok-kelompok muslim juga, bagaimana mungkin ada islamisasi terhadap islam, maka sebenarnya gejala ini tidak lebih dari upaya arabisasi.

Keempat, membendung pengaruh-pengaruh konflik dari luar Indonesia, khususnya dari Timur Tengah, di mana terjadi persaingan kuat antara kubu-kubu, misalnya Saudi yang Wahhabi dan Iran yang Syiah (kasus Suriah dan Yaman) yang sebenarnya murni politik, namun menyeret agama, sehingga yang berperang adalah dua aliran keagamaan (Sunni vs Syiah). Kubu-kubu yang berkonflik di Timur Tengah mencari pengikut di luar kawasan mereka, termasuk di Indonesia. Konflik di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap muslim di Indonesia. Islam Nusantara menegaskan tidak terlibat dan tidak mau melibatkan diri dengan perang saudara antar muslim di Timur Tengah.

Kelima, diperlukannya suatu model keislaman yang khas Indonesia yang bisa menjadi rujukan dunia internasional, khususnya Dunia Islam dalam pola relasi

antara Islam dengan demokrasi, HAM, keragaman budaya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah dipuji karena sukses melakukan reformasi dan demokratisasi dalam proses damai dan terus membaik dibandingkan Dunia Islam lainnya, seperti Dunia Arab (Mesir, Libya, Suriah, Yaman, Iraq yang terus konflik, kegagalan reformasi dan demokrasi di Negara-Negara Arab Teluk) atau Dunia Islam lainnya, misalnya Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria.

Keenam, upaya instrospeksi *(muhasabah)* bagi kalangan santri/putihan. Bagi kelompok "modernis" diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mengapresiasi budaya dan kearifan lokal, kritik dari kelompok ini datang dari dua tokohnya, misalnya Kuntowijowo dan Moeslim Abdurrahman yang meminta Muhammadiyah lebih peduli pada budaya dan kearifan lokal. Dalam kalangan "tradisionalis" yang sering dicitrakan menerima budaya dan kearifan lokal namun ternyata tidak sedikit kubu puritannya juga. Tidak sedikit kyai dan ulama NU yang masih mencurigai budaya, tradisi dan seni lokal (rakyat) dengan alasan bertentangan dengan akidah dan moralitas agama maupun karena persaingan dalam politik identitas (misalnya menganggap "seni rakyat" adalah identitas abangan).

BAB V

SINERGI ISLAM NUSANTARA DENGAN NILAI-NILAI ESENSIAL ISLAM, PANCASILA, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Muslim adalah identitas keagamaan bagi seseorang yang meyakini Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya. Pengakuan ini disebut sebagai syahadat. Siapapun yang berikrar dengan syadahat tadi disebut sebagai muslim.

Ajaran Islam dibagi menjadi tiga: akidah (keyakinan), syariah (perbuatan) dan akhlaq (keluhuran/keutamaan). Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu kalam/tauhid, ilmu yang membahas syariat disebut fiqih, sementara yang membahas keutamaan/keluhuran disebut ilmu akhlaq/tasawuf. Meskipun tiga hal tadi memiliki tiga istilah yang berbeda, namun ketiganya saling terkait dan tidak terpisahkan, tidak ada yang lebih tinggi dan unggul, yang bisa menafikan bagian yang lain. Akidah menjadi landasan bagi perbuatan yang baik. Dalam Al-

Quran disebutkan:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S an-Nahl: 97)

Islam dibangun di atas lima fondasi yang disebutkan dalam hadits:

'Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan. (HR. Bukhari-Muslim).

Akhlaq yang berarti perbuatan yang mulia yang terkait dengan tatakrama dan sopan merupakan doktrin yang penting dalam Islam. Dalam banyak hadits Nabi disebutkan keimanan dan keislaman seseorang terkait dengan akhlaq yang mulia:

Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ***yang terbaik akhlaknya****, dan sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah* ***orang yang terbaik memuliakan para perempuan*** (HR. Ahmad).

Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah ***yang terbaik akhlaknya*** (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Barang siapa yang ***beriman pada Allah*** *dan* ***Hari Akhir*** *maka hendaklah ia* ***menghormati tetangganya****. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia* ***menghormati tamunya****.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sebelahnya, dan ia mengetahuinya (HR. Al-Bazzâr dan Al-Thabrani).

Banyak yang menyepelakan masalah akhlaq karena dianggap "hanya terkait perbuatan yang baik dan buruk" padahal tanpa akhlaq keimanan dan keislaman seseorang tidak sempurna, bahkan bisa dianggap batal. Mengerjakan rukun-rukun Islam akan sia-sia tanpa akhlaq dan bisa dihitung tidak sah.

Istilah "lalai" bisa masuk kategori akhlaq, tidak ada dalam syarat dan rukun shalat, namun dalam Al-Quran orang yang lalai dalam shalat disebut orang yang celaka (QS. Al-Ma'un: 3-4). Ingin pamer (riya') adalah masalah akhlaq, namun kalau zakat dan bersedekah dengan tujuan pamer (riya') maka akan batal pahalanya. Demikian juga marah dan berkata kasar yang sering dikategorikan dalam ranah akhlaq namun kalau saat berpuasa masih marah-marah dan berkata kasar, maka tidak akan dapat apa-apa dari puasa itu kecuali hanya lapar dan haus (HR At-Thabrani). Demikian pula dalam haji yang dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, buruk dan pertikaian (rafats, fusuq, jidal) yang perbutan-perbuatan ini sering dimasukkan dalam ranah akhlaq, namun kalau dilanggar dalam haji maka hajinya akan sia-sia (QS. Al-Baqarah: 197).

Dalam Islam dikenal dua relasi: relasi dengan Tuhan disebut *(habl minallah)* dan relasi dengan sesama manusia *(habl min an-nas).* Ranah akhlaq akan tampak kuat dalam relasi dengan sesama manusia. Karena mengakui dan menghargai hak-hak manusia yang lain tanpa pandang suku, agama, ras, golongan, gender, dan atribut-atribut kemanusiaan lainnya merupakan

ajaran yang prinsipil dalam Islam. Aqidah dan syariah mengatur relasi muslim dengan Tuhan dan sesama muslim, sementara akhlaq menjadi landasan hidup bersama dengan sesama manusia. Dalam hadits disebutkan:

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain (HR. Ahmad dan Al-Thabrani)

Sabda ini menggunakan istilah yang umum *al-nâs* manusia yang berarti siapa pun. Manfaat da faedah orang itu pun juga berlaku universal "bagi manusia yang lain".

Esensi Islam: Tauhid, Kasih Sayang dan Keadilan Sosial

Dasar Islam adalah tauhid, pengesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Pengabdian muslim adalah semata-mata hanya untuk Allah Swt. Dalam Al-Quran disebutkan:

*Sungguh, **Tuhanmu adalah Satu**! Tuhan langit dan bumi dan segala yang ada antara keduanya, (dan Dia juga) Tuhan bagi tempat-tempat terbitnya matahari. Sungguh,*

telah Kami hiasi langit terdekat dengan hiasan bintang-bintang. (QS. al-Shâffât [37]: 4-6).

Konsekuensi tauhid kepada Allah Swt akan memberikan dampak pada hal-hal berikut:

1. Karena hanya Allah yang Maha Esa, maka yang lainnya berbeda-beda. Maka keanekaragaman yang ada di alam semesta ini merupakan kehendak Allah Swt, Allah Swt pula yang menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari jenis kelamis *(jins)*, bahasa dan budaya *(alsinah)*, agama-agama *(syir'ah, milal).* Maka tauhid menuntut pandangan dan sikap anti diskriminasi terhadap pelbagai perbedaan yang telah Allah Swt ciptakan untuk manusia.

2. Pengabdian dan penghambaan serta kemutlakan hanya Allah Swt saja, oleh karena itu bentuk kesewenang-wenangan, penjajahan, diskriminasi, kekerasan, despotisme, tirani, kezaliman atas nama doktrin agama, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya yang merampas kemuliaan

manusia bertentangan dengan doktrin tauhid dalam Islam.

Esensi kedua dalam Islam adalah kasih sayang *(compassion).* Islam adalah ajaran kasih sayang bagi semua (rahmatan lil alamin).

Allah menyebut pengutusan Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Nabi Muhammad Saw adalah rahmat bukan laknat, berkah bukan bencana.

Kami mengutusmu (Muhammad) semata-mata sebagai rahmat bagi seru sekalian alam (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Allah mewajibkan atas diri-Nya untuk melimpahkan kasih sayang.

Tanyakanlah, "Kepunyaan siapakah apa yang di langit dan bumi?" Jawablah "kepunyaan Allah." ***Ia mewajibkan atas Diri-Nya (melimpahkan) kasih sayang*** (QS. Al-An'âm [6]: 12)

Dan kalimat yang sering diucapkan sebagai permulaan

dari tindakan seseorang muslim menyebut Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Nabi Muhammad Saw meminta agar umatnya menyayangi siapa saja yang di muka bumi, karena Dia yang di langit akan menyayangi orang yang senang menyayangi.

Orang yang penuh kasih sayang akan disayangi Yang Maha Penyayang. Sayangi siapa pun di muka bumi, maka kamu akan disayangi Dia yang di Langit (HR. Al-Tirmidzi)

Nabi Muhammad Saw pun diminta oleh Allah untuk mengedepankan kasih sayang, lemah lembut dan memaafkan umatnya. Sikap yang keras dan berhati kasar hanya akan mematikan simpati orang yang membuat mereka lari menjauh.

Adalah karena kasih sayang Allah maka kamu (Muhammad) berlaku lemah-lembut terhadap mereka*, sekiranya kau kejam dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu. Maka maafkanlah*

mereka dan mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam (segala) urusan. (QS. Âli Imrân [3]: 159).

Alih-alih merestui sikap yang kasar, Allah meminta agar Nabi Muhammad Saw untuk memaafkan bahkan memintakan ampun serta bermusyawarah.

Mengajak dengan lemah lembut merupakan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menemui Firuan yang jelas-jelas menentang dan berbuat sewenang-wenang.

*Pergilah kamu kepada Firaun, karena ia berlaku sewenang-wenang, **berkatalah kepadanya dengan perkataan lemah lembut**, mudah-mudahan ia mau menerima peringatan, atau takut (kepada Tuhan).* (QS. Thâhâ [20]: 43-44).

Sebagai dakwah, Islam mengakui tiga metode dakwah yang telah dikenal dan digariskan oleh Allah dengan metode: kebijaksanaan, peringatan yang baik, atau perdebatan dengan cara yang terbaik.

*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan **hikmah** dan **peringatan yang baik**, dan **bantahlah mereka***

dengan (bantahan) yang terbaik**. Sungguh, Tuhanmu,* ***Ia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Ia yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl [16]: 125).

Mengapa kita harus menggunakan cara tanpa kekerasan dan pemaksaan dalam mengajak orang? Akhir ayat di atas memberikan jawaban: karena yang paling tahu yang beriman dan tidak, hanya Allah semata. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak pada orang lain.

Esensi ketiga dalam Islam adalah keadilan Sosial (*social justice*).

Al-Quran telah memberikan jalan bagi ajaran Nabi Muhammad dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan mencela sistem sosioekonomi yang ada waktu karena sangat eksploitatif dan menghisap tanpa batas.

Menurut Fazlurrahman ajaran tauhid (monoteisme) Nabi Muhammad Saw sejak awal terkait dengan humanisme dan keadilan sosial-ekonomi yang penekanannya tak kurang penting dibanding ide monoteistik. Tuhan

yang disangkal orang-orang Mekkah ketika itu adalah Tuhan yang menuntut transformasi konkret masyarakat, dari eksploitasi ke keadilan, dari memementingkan diri ke sifat sebaliknya, dari arogansi ke kerendahan hati, dari kesukuan sempit menuju persatuan orang-orang yang berkomitmen pada visi masyarakat baru ini.

Seperti praktik lintah darat (rentenir) dengan riba yang berlipat-lipat.

Hai orang yang beriman janganlah memakan riba berlipat-lipat ganda, tapi bertakwalah pada Allah, supaya kamu memperoleh kejayaan (Âli Imrân [3]: 130)

Allah mengecam keras pratik riba lintah darah ini dengan memberikan perumpamaan yang keras seperti "orang yang kerasukan syaitan sehingga gila" dan Allah memerintahkan dengan tegas penghentikan praktik ini dan menyatakan perang terhadap pihak yang tida mau meninggalkannya.

Orang yang memakan riba tiada akan berdiri (kembali, di hari Kiamat) kecuali seperti berdirinya orang kerasukan syaitan sehingga gila... jika tiada kamu lakukan (meninggalkan pratik lintah darat) ketahuilah, Allah dan

Rasul-Nya akan memerangi kamu (QS Al-Baqarah [2]: 275, 279).

Orang yang terpaksa berhutang maka pihak pemberi hutang dianjurkan memberinya kelonggaran dan lebih utama lagi untuk membebaskannya dengan tujuan bersedekah,

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai ia kelaparan berkelaparan tapi memberikan sebagai sedekah lebih baik bagimu sekiranya kamu tahu (QS Al-Baqarah [2]: 280)

Al-Quran menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya ada hak dan bagian orang yang miskin.

Dalam kekayaannya (mereka selalu ingat) hak peminta-minta, dan orang yang hidup berkekurangan (QS Al-Dzâriyât [51]: 19)

Dan orang yang dalam kekayaannya ada hak yang telah ditentukan, bagi peminta-minta dan orang tiada berada (QS Al-Ma'ârij [70]: 24-25)

Tujuan kesadaran ini tidak hanya sekadar kepedulian sosial saja namun tegaknya prinsp keadilan yang distributif:

...supaya (harta) jangan hanya beredar di antara orang kaya saja.. (QS Al-Hasyr [59]: 7)

Islam mengecam segala pratik kecurangan dan ekspolitasi yang berbasis sosial dan ekomomi yang menjadi sebab utama ketimpangan dan penindasan manusia saat itu. Dalam surat-surat Al-Quran yang turun pada periode Mekkah sangat tegas dan jelas kecaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi zaman itu. Keuntungan yang diambil dari praktik perniagaan yang curang.

Celakalah orang-orang yang curang (1) orang yang bila menerima takaran dari orang lain menuntut (takaran) sepenuhnya (2) tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk (orang lain) mereka mengurangi (takaran) (3) tiadakah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan (4) pada hari yang dahsyat (5) hari tatkala manusia berdiri depan Tuhan sekalian alam (6) (QS Al-Muthaffifîn [83]: 1-6)

Ekonomi Jahiliyah juga bertumpu pada eksploitasi manusia dalam perbudakan. Maka membebaskan budak diajurkan dengan tegas. Selain itu peduli pada bencana kelaparan dan pihak-pihak yang membutuhkan. Sikap ini disebut jalur yang sukar *('aqabah)*, namun sangat dianjurkan, dalam surat Al-Balad (90) disebutkan:

Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? (11) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) Membebaskan hamba dari perbudakan (13) atau memberi makan pada hari kelaparan (14) kepada anak yatim bertalian kerabat (15) atau orang miskin terlunta-lunta (16)

Pola hidup yang penuh kemewahan dan berlebihan juga dikecam seperti dalam surat Al-Takâtsur (102):

Bermegah-megah karena banyak harta dan pengikut menjadikan kamu lalai (1) sampai kamu masuk kuburan (2)

Nada yang tak kalah keras diabadikan dalam surat Al-Humazah (104):

Celakalah setiap penyebar fitnah dan pengumpat (1) yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya (2) yang mengira kekayaan mengekalkannya (3) sama sekali tidak! Ia akan menjerumuskannya ke dalam Hutamah (4) Bagaimana kau tahu apakah Hutaman? (5) (Itulah) Api Allah yang dinyalakan (6) Yang naik masuk jantung (7)

Dalam surah Quraisy (106) Tuhan identik dengan tindakan kongkrit: memberikan makanan dan perlindungan keamanan:

Hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rmah ini (3) yang memberi mereka makanan supaya tidak kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan (4)

Dalam surat Al-Mâ'un (107) disebutkan ciri-ciri pendusta agama yang tak ada kaitannya dengan kemusyrikan dan keyakinan yang abstrak, tapi pada tindakan yang sewenang-wenang:

Tahukah kami orang yang menudustakan agama? Itulah orang yang mengusir anak yatim, dan tiada menganjurkan memberi makan pada orang miskin, maka celakalah orang-orang yang shalat, yang melalaikan

shalatnya, mereka yang ingin dilihat orang, tapi enggan (memberikan) sedekah (berupa) keperluan yang berguna.

Kelenturan Syariat Islam dan Penguatan Kearifan Lokal

Islam Nusantara berbasis pada prinsip kelenturan syariat Islam. Dalam studi syariat Islam dibedakan ranah ibadat (ibadah-ibadah murni yang merupakan relasi ketuhanan) dengan ranah *mu'amalat* (relasi sosial kemanusiaan), dalam mu'amalat terkandung munakahat (pernikahan) yang terkait dengan masalah perdata, juga masalah pidana (jinayat). Ulama syariat terdahulu telah membedakan pendekatan terhadap dua ranah ini, ibadah ditekankan pada tekstual, artinya ibadah harus memiliki landasan tekstual, sementara non-ibadah lebih mengarah ke aspek *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan), *'illah* (alasan rasional) dan *falsafah al-tasyri'* (filosofi syariat).

Menurut Dr Muhammad Salam Madkur, tokoh dari Mesir, Syariat Islam memiliki sejumlah pilar: (1) Menafikan kesusahan dan paksaan (*nafyul haraj)* (2) Meminimalisir beban *(qillatut takalif)*, (3) Bertahap *(at-*

tadarruj), (4) kemaslahatan manusia *(mashalihun nas),* (5) menegakkan keadilan *(tahqiqul adalah)* .

Syariat Islam memiliki dua sumber utama yakni Al-Quran dan Hadits serta sejumlah metode penggalian hukum (thariqah istinbath al-hukm).

Sumber Utama syariat Islam adalah Al-Quran dan Hadits yang menurut KH Afifuddin Muhajir, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur, perlu dibaca dari sisi *maqashid syariah* agar melahirkan hukum yang tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual.

Selain Al-Quran dan Hadits diperlukan juga melakukan opitmalisasi terhadap sumber-sumber sekunder (non-Quran dan Hadist) yang dikenal dalam Ushul Fiqih sebagai metode *Qiyas (analogi), Istihsan, Ishtishab, Syar'u Man Qablana, Al-'Urf, Syadzdz Dzra'i'.*

Selain opitmalisasi sumber-sumber sekunder syariat Islam dipelukan juga optimalisasi terhadap kaidah-kaidah fiqih misalnya: (1) Adat/Budaya Adalah Hukum *(al-'adahatu muhakkamah), (2)* Segala Perkara Tergantung Tujuan/Maksud *(al-umur bi maqashidiha),*

(3) Menghilangkan Kerusakan/Negatif *(izalatut dharar),* (4) Kesulitan Memperbolehkan Kemudahan *(al-masyaqqah tajlibut taysir),* (5) Dasar keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan *(al-yaqinu la yazulu bis syakki).*

Maka Islam Nusantara telah memperoleh basis keislaman yang kuat dari sisi syariat Islam, yakni pengakuan terhadap kelenturan syariat Islam, membaca sumber-sumber primer (Al-Quran dan Hadits) dari sisi maqashid al-syariah, melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber sekunder, serta optimalisasi terhadap kaidah-kaidah fiqih sebagai penggalian hukum. Hal yang paling penting dalam konteks Islam Nusantara adalah peran adat yang disebut sebagai *al-'urf* atau *al-adah* atau juga syar'un man qablana (syariat sebelum kita/Islam) menunjukkan penerimaan terhadap kemuliaan adat-adat di Nusantara yang sering disebut sebagai kearifan-kearifan lokal.

Dalam relasi dengan sesama manusia dan kehidupan sosial kemasyarakat, ada sikap seorang muslim yang dirumuskan oleh KH Ahmad Shiddiq, Rais Aam PBNU tahun 80-an, yakni pandangan dan sikap yang:

Tawassuth (moderat)

Tawazun (berimbang)

Tasamuh (toleran)

I'tidal (Tegak, Konsisten, Istiqamah)

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Mendorong perbuatan baik dan mencegah semua hal yang bisa menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan)

Selain itu juga pengakuan terhadap tiga prinsip persaudaraan (al-ukhuwwah) dalam konteks keindonesiaan:

- Persaudaraan Keislaman (Ukhuwah Islamiyah)
- Persaudaraan Kebangsaan (Ukhuwah Wathaniyah)
- Persaudaraan Kemanusiaan (Ukhuwah Basyariyah)

Pancasila Sebagai Basis Ideologis Islam Nusantara

Pancasila dan UUD 1945 adalah basis kekuatan Islam Nusantara dalam konteks keindonesiaan. Dimulai dari rumusan tidak adanya pertentangan antara Islam dan Pancasila, bahkan dinyatakan, sila-sila dalam Pancasila merupakan ajaran Islam, maka menerima, menjalankan dan membela Pancasila dihitung sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam. Pancasila juga bisa dianggap sebagai produk Islam Nusantara, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan akulturasi ajaran Islam dengan budaya, bahasa, dan prioritas yang berasal dari konteks. Kalau Islam disebut sebagai dasar negara, maka, golongan-golongan di luar Islam dipastikan akan menentang, imbasnya adalah persatuan dan keutuhan bangsa terancam. Oleh karena itu ajaran-jaran Islam perlu dibahasakan kembali, dirumuskan, disesuaikan dengan budaya dan prioritasnya dengan konteks lokal. Dengan Pancasila, Islam Nusantara berbeda dari kelompok-kelompok Islam yang anti Republik Indonesia Pancasila dan UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok-kelompok Islam ini merupakan "proxy" dari jaringan politik negara-negara di Timur Tengah yang sedang berperang.

Sumbangan Tokoh Islam terhadap Definisi Pancasila

Pancasila "ditemukan" oleh Soekarno. Tanggal 1 Juni dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang penyusunan Undang-Undang Dasar bakal Republik Indonesia yang disebut "Panitia 62", Ir. Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Menurut Kiai Masykur, Komandan Pasukan *Sabilillah* yang ikut serta dalam diskusi panitia tersebut memberikan informasi yang menarik tentang sumbangan tokoh-tokoh Islam terhadap definisi Pancasila. Menurutnya dalam diskusi yang panjang akhir Mei 1945 antara Soekarno dan tiga pemimpin Islam lainnya, yakni Kiai Wahid Hasyim (dari NU), Kiai Masykur sendiri dan Kiai Kahar Muzakkir dari Partai Islam Indonesia (PII). Berikut transkripnya:

> *…di rumahnya Muhammad Yamin, saya, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu.*
>
> *-Lantas Bung Karno tanya: "Ada Apa?"*
>
> *-"Kita ini ingin dasar Islam tetapi kalau*

dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah?"

-Bung Karno katakan: "Coba tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini?"

-Yamin mengatakan: "Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaanya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, nyekar, untuk mencari Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu."

-Lantas Bung Karno katakan: "Nah! Ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu... Kalau begitu negara kita dari dulu itu sudah bertuhan! ...Ketuhanan! Bagaimana Islam? Ketuhanan! Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan. Mufakat? Bangsa Indonesia ketuhanan. Tulis! Tulis! Ketuhanan. Bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?

-Bangsa Indonesia... kalau datang dikasi wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu, sampai-sampai kalau sama-sama menemani."

-"Kalau begitu.." kata Bung Karno, "bangsa Indonesia itu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong. Kerjasama, peri kemanusiaan."

-Wahid Hasyim: "Kemanusiaan boleh, tapi mesti adil. Jangan sendiri boleh tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu. 'Kalau Siti Fatimah mencuri saya potong tangannya' (sabda Rasulullah Saw), Siti Fatimah putri Rasulullah. Jadi harus adil, biar anaknya, kalau salah, ya salah... Ini Islam..."

-"Lantas ada lagi.." Bung Karno katakan: "Siapa dulu?"

- Kahar Muzakkir lontarkan: "Ada orang budayanya tidak mau disentuh

tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan, pengemis, kasih uang dilempar saja. Kalau dalam Islam tidak bisa...harus diserahkan dengan baik. Jadi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi."

- Lantas sampai kepada orang Indonesia dulu, orang Jawa itu dulu suka memberikan apa-apa sama tetangganya, kalau rumah ini tak punya cabe, minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini... ini namanya tolong menolong. Gotong royong...kalau ada apa kumpul orang-orang desa. Satu sama lain tanya bagaimana baiknya. Ini dikatakan oleh Bung Karno musyawarah, jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakatan, kalau mau menamakan anaknya, yang diambil biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan... orang dulu kalau minta apa-apa dikasihkan, sampean minta apa, biar di sini habis

diberikan. Solidaritas sosialnya. Lalu ditanyakan pada Islam. Islam memang zakat, kita kewajiban zakat, kita memberikan kepada fakir miskin, yang kaya memberikan kepada fakir miskin, jadi sampai kesimpulan lima itu (lima sila). Kesimpulan lima tadi mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan rukun Islam itu lima, jadi lima ini saja bisa dikembangkan satu persatu, tapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa lima... Ini dijadikan Bung Karno Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isim (nama, istilah) nya yang diambil, kalau Pancasila itu musamma (subtansi, isi) yang diambil (dari Islam). Sila-sila (dalam Pancasila) itu musamma (isi dan subtansinya) Islam. Lima ini kita umat Islam, ini sebagai musammanya, isi Islam..

-Lantas Bung Karno katakan: "Mau saya usulkan, Pancasila. Awas kalau ad yang

mengacau!" (Kiai Masykur ketawa imitasi Bung Karno), 'Awas!'

Pengakuan Kiai Masykur ini dalam wawancara yang direkam dalam kaset oleh Arsip Nasional tanggal 1 Oktober 1988 menegaskan sumbangsih tokoh-tokoh Islam tadi terhadap perumusan dan definisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Seperti yang ditegaskan oleh Kiai Masykur, Pancasila merupakan *musamma* (isi, subtansi) dari ajaran-ajaran Islam. Kiai Masykur merupakan lahir tahun 1902 di Malang, Jawa Timur. Ia menjabat Menteri Agama dari tahun 1946-1949, kemudian 1953-1955. Menjadi anggota DPR sejak tahun 1955 dan menjadi wakil ketua PPP pada tahun 1973. (Andree Feillard: 1999, 32-35).

Testimoni Kiai Masykur tadi menunjukkan Pancasila merupakan kesepakatan antara tokoh-tokoh Islam. Dalam perjalanan selanjutnya, muncul rumusan sila pertama Pancasila "Ketuhanan" dengan tambahan *dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* yang dikenal dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Juni 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) rumusan tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang

Maha Esa" setelah ada protes dari AA Maramis dan para utusan Indonesia Timur bahwa kalimat "syariat Islam" bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sebelum sidang dimulai Moh. Hatta memanggil empat anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam: Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Teuku Mohamad Hasan (Aceh) dan Kiai Wahid Hasyim (NU). Sebagai gantinya Kiai Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan (Tauhid) yang tidak terdapat pada agama-agama lain. Setelah persetujuan tokoh tersebut, draft itulah yang dibawa ke sidang PPKI dan disahkan.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan sikap arif tokoh-tokoh Islam saat itu dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kejadian ini mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw saat Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah *(Sulh Hudaibiyah)*. Draft perjanjian yang ditulis oleh Imam Ali ditolak oleh pemuka-pemuka Quraisy karena ada kalimat "bismillahhirrahmanirrahim"

dan “Muhammad Rasulullah”, mereka meminta kata “bismillahirrahmanirrahim” dan “rasulullah” dihapus diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad Saw pun menghapusnya dengan tangan beliau sendiri, agar kesepakatan damai terlaksana. Mungkin kebetulan, jumlah tujuh kata dalam Piagam Jakarta sama persis dengan tujuh kata yang dihapus Nabi Muhammad Saw dalam Piagam Hudaibiyah: *Bi, Ism, Allah, Arrahman, Arrahim, Rasul, Allah*—juga tujuh kata! Tujuh kata dianggap tidak terlalu penting oleh Nabi Muhammad Saw meskipun sempat terjadi polemik antara dia dan sahabat, seperti halnya polemik dalam sidang perumusan Piagam Jakarta soal dasar Negara “syariat Islam”, tetapi yang dianggap penting adalah kesepakatan terlaksana.

Lima Alasan Umat Islam Indonesia Menerima Pancasila

Oleh karena itu ada alasan yang mendasar dari umat Islam untuk menerima dan mempertahankan Pancasila, *pertama,* Pancasila adalah kesepakatan (akad) yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan sebagai amanat dan dilarang mengkhianati. Kesepakatan ini antar golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah kesepakatan-kesepakatan (akad-akad) kalian (QS. Al-Ma'idah: 1).

Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram (HR. At-Tirmidzi)

Barang siapa yang berkhianat pada mitranya atas perkara yang diamanatkan padanya, maka aku (Nabi) lepas tangan darinya, dan barang siapa yang mengkhianati orang yang memberikan kepercayaan padanya, maka aku akan menjadi musuhnya di akhirat nanti (HR. Ahmad)

Dalam sejarah Nabi Muhammad Saw dikenal Piagam Madinah yang merupakan kesepakatan politik antara Nabi Muhammad Saw dengan komunitas-komunitas lain di kota Madinah, baik dengan bangsa Arab mampun dengan bangsa Yahudi. Kesepakatan ini terjadi pada tahun 622 M.

Kedua, Pancasila adalah titik temu, *common platform* (kalimatun sawaa') dalam konteks kebangsaan. Ini istilah yang sering dipakai oleh Nurcholish Madjid dengan menyitir ayat Quran:

Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. (QS. Ali 'Imran: 64)

Ketiga, lima sila dalam Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Esa di sini menurut ulama NU sebagai pengesaan Tuhan (Tauhid), sehingga menerima dan mengamalkan terhadap sila tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam. Hal ini terekam dalam argumentasi penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

1. *Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.*

2. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29*

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. *Bagi Nahdlatul 'Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.*

4. *Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.*

5. *Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul 'Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.*

Munas NU Sukorejo, Situbondo, 21 Desember 1983

KH Ahmad Shiddiq tokoh penting yang menerima Pancasila dan akhirnya terpilih menjadi Rois Aam PBNU dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo memberikan pandangan tentang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

> "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan Keesaan Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid. Adanya pencantuman anak kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa.
>
> Dalam kenyataan, mayoritas bangsa kita beragama Islam, dan jumlah mereka merupakan jumlah kelompok Muslim terbesar di seluruh dunia. Sehingga dukungan mereka kepada Negara Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembenaran wujud Negara tersebut dipandang dari sudut pemikiran keagamaan yang dibawakan oleh Islam...mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk

> memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan duniawi wajib hukumnya; kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat semua pihak, termasuk ummat Islam; hasil dari kesepakatan yang sah itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya;... Jelaslah bahwa Republik Indonesia adalah Negara nasional yang wilayahnya dihuni oleh penduduk yang sebagian terbesar memeluk agama Islam. Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara."

KH. As'ad Syamsul Arifin, seorang kiai kharismatik dari Sukorejo Situbondo yang pesantrennya menjadi tempat Munas dan Muktamar NU menegaskan penerimaan dan pembelaannya terhadap Pancasila melalui kata-kata beliau: "Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan dan harus dijaga kelestariannya"

> *Keempat,* Pancasila adalah "obyektivitasi" dari nilai-nilai Islam, sebagaimana disampaikan oleh Kuntowijoyo, tokoh Muhammadiyah. "Obyektivitasi" adalah proses menjadikan "yang subyektif" menjadi "obyektif". Kalau kita sebut dasar negara adalah syariat Islam, maka golongan di luar Islam pasti menolak, namun kalau kita "obyektifkan" nilai-nilai subyektif tadi, maka ajaran yang sebelumnya subyektif, akan menjadi obyektif. Inilah Pancasila. Karena itu, terjadi kesepakatan antara tokoh Islam dan yang di luar Islam.

Kelima, adanya konsensus *(ijma')* dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang sudah menerima Pancasila dan menyatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan Islam.

Pancasila Menurut Ajaran Islam

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah implementasi dari tauhid. Dalam Al-Quran disebutkan: *Qul huwallahu ahad*—Katakan! Dialah Allah Yang Esa (QS. Al-Ikhlash: 1)

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Islam sangat memuliakan manusia *(karamatul insan)* dan kemuliaan ini diberikan langsung oleh Allah Swt yang artinya tidak boleh direnggut oleh siapapun: *walaqad karramna bani Adama* Dan sungguh telah Aku muliakan anak cucu Adam (manusia) (QS. Al-Isra': 70)

3. Persatuan Indonesia, bersatu merupakan perintah Allah Swt: *wa'tashimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu* Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai (QS. Ali Imran: 103), atau *wata'awanu alal birri wat taqwa* Dan saling bekerjasama kalian atas kebaikan dan ketakwaan dan janganlah bekerjasama atas dosa dan permusuhan (QS. Al-Ma'idah: 2)

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Rakyat berasal dari bahasa Arab *ra'iyyah* artinya gembala, dalam konteks ini, rakyat merupakan sumber kedaulatan yang menentukan, maka kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat, hal ini digariskan dalam

kaidah ushul fiqih, *tasharruful imam alal ra'iyyah manuthun bil mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat), kata hikmah/kebijaksanaan diakui sebagai cara pertama dan utama dalam ajakan/dakwah Islam—*ud'u ila sabili rabbika bil hikmati* (ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah/kebijaksanaan) QS. Al-Nahl: 125. Sementara kata permusyawaratan berasal dari bahasa Arab, musyawarah, Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar bermusyawarah dengan para sahabat: *wa syawirhum fil amri* (dan bermusyawarlah kamu dengan mereka dalam suatu perkara (QS. Ali Imran: 159) sedangkan perwakilan yang merujuk pada lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR/DPD) dikenal dalam politik Islam sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* yang pernah dipakai oleh Umar bin Khattab dengan menunjukkan beberapa orang sahabat untuk memilih penggantinya. Penggunaan *Ahlul Halli wal Aqdi* ini diakui oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Hukum-Hukum Kekuasaan)

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran kita diperintah untuk menegakkan keadilan *I'dilu huwa aqrabu lit taqwa* (tegakkan keadilan karena ia identik dengan ketaqwaan) (QS. Al-Ma'idah: 8) Keadilan yang dimaksud dalam sila ini adalah keadilan yang merata, untuk semua rakyat, tanpa pandang agama, suku, status sosialnya, keadilan yang tidak diskriminatif.

Seorang intelektual garda depan dari kalangan "modernis" Nurcholish Madjid memberikan apresiasi terhadap Pancasila pada era Reformasi meskipun di era sebelumnya Orde Baru, di tangan politisi yang tidak bertanggung jawab Pancasila dipakai untuk tujuan-tujuan kekuasaan dan memberikan pengalaman pahit bagi bangsa ini. Pancasila telah menyimpang dari fungsinya yang sejati. Dalam buku *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi,* Cak Nur tetap memandang penting Pancasila, meskipun saat itu tengah dipertanyakan dan dianggap "usang" atau malah senjata Orde Baru untuk melakukan represi. Dalam konteks umat Islam, bagi Cak Nur Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengajak umat Islam tetap menyetujui Pancasila dengan dua alasan, *pertama*, nilai-nilainya dibenarkan

oleh agama Islam, *kedua*, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar golongan untuk membangun kesatuan politik. Lebih lanjut Cak Nur menjelaskan "seorang muslim yang baik, seorang Indonesia penganut Islam dengan sendirinya menjadi warga negara yang baik pula. Oleh karena itu kaum muslim Indonesia harus melaksanakan hak sah mereka dalam Pancasila yaitu hak untuk memahami dan mengamalkan agama mereka secara sepenuh-penuhnya. Kaum muslim dapat mengamalkan Pancasila hanya jika mereka memahami dan mengamalkan agama mereka secara benar." (Nurcholish Madjid: 1999, 78).

Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muhammadiyah memiliki penilaian yang senada dengan Cak Nur bahwa benar pada suatu era (Orde baru) "penerimaan Pancasila sebagai dasar filosofis partai atau ormas pernah dipaksakan, tetapi setelah dikaji dalam konteks kultur Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat yang secara rasional dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa...bangsa ini harus kita bela, tidak boleh tersungkur dan tercabik oleh kepentingan-kepentingan picik dalam bingkai nasionalisme lokal, primordialisme, atau politik agama yang berwawasan sempit dan monolitik." (2015, 25)

Menurut hemat kami, argumentasi ormas dan tokoh-tokoh Islam di atas yang menerima dan membela Pancasila dengan memahami Yang Maha Esa sebagai tauhid (pengesaan Tuhan) sah-saja saja, namun tanpa harus menafikan tafsir-tafsir lain terhadap "Esa". Karena dalam kajian lain "Esa" bermakna yang "tidak terdefinisikan" bukan otomatis makanya "satu" atau "tunggal". Orang Jawa memaknai Esa sebagai *Suwung* (kosong), "kosong" berarti bukan tidak ada isi, tapi Tuhan yang Tidak Terdefinisikan, saking besar-Nya. Mungkin mirip Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bagaimana kebesaran Tuhan? Tak terlukiskan.

Dalam sejarah teologi Islam pengesaan Tuhan juga menjadi perdebatan. Konsep Mu'tazilah yang menggunakan rasio dan menafikan sifat-sifat untuk mengesakan Tuhan, Asya'ari yang percaya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz, atau Salafi yang mendefinisikan Tauhid dalam tiga aspek: *rububiyah* (Dia sebagai satu-satunya Tuhan Pencipta), *uluhiyah* (Dia satu-satunya yang disembah) *asma' was shifat* (nama-nama dan sifat-sifat Tuhan). Masing-masing kelompok merasa dan mengaku paling mengesakan Tuhan.

Kritik menarik dari KH Said Aqil Siradj yang memaknai kembali Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang di dalamnya kritik dia pada Asy'ari dengan meletakkan teologi ini sebagai *manhaj fikr* (metode berfikir), yang menurutnya, perlu bergerak dari perdebatan teologis yang abstrak pada nilai-nilai keberagamaan yang bisa universal, yakni: *tawassuth* (moderat, di tengah) karena Asy'ari ingin mengambil jalan tengah antara Jabariyah yang fatalis dan Mu'tazilah yang terlalu rasional, nilai lain adalah *tawazun* (berimbang), berimbang antara teks agama dan nalar manusia (wahyu dan akal), juga *tasamuf* (toleran) tidak mengafirkan yang berbeda konsep teologi dan aliran lainnya.

Dalam konteks ini seruan KH Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah menemukan relevansinya, untuk melakukan transformasi dari tauhid yang abstrak-ketuhanan pada tauhid yang kongkrit, praksis, kemanusiaan yang disebut "tauhid sosial", yang memiliki implikasi terhadap aksi-aksi sosial. KH Masdar F Mas'udi dari NU pernah mengenalkan konsep "Islam Emansipatoris", "Islam yang membebaskan".

Intinya, konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak boleh ditafsirkan secara tunggal, tetap terbuka bagi

siapapun yang ingin menafsirkannya dengan tetap memiliki pandangan yang toleran, moderat dan berimbang terhadap penafsiran-penafsiran yang lain. Dan yang lebih penting lagi, tidak hanya berhenti pada konsep Ketuhanan (karena "Tuhan Tidak Perlu Dibela" kata Gus Dur), tapi memiliki implikasi sosial yang merupakan sila-sila dari Pancasila selanjutnya, bagaimana konsep Ketuhanan itu bisa berdampak pada kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Di sinilah ada titik temu antara ormas keislaman seperti NU dan Muhammadiyah dalam pengabdian kemanusiaan, baik di sektor pendidikan, pelayanan masyarakat, kepedulian terhadap yang lemah *(dhu'afa)* dan dilemahkan *(mustadh'afin)*. Maka sudah benar yang sebenar-benarnya, ormas dan tokoh Islam yang berpendapat menerima, menjalankan dan membela Pancasila merupakan upaya umat Islam menjalankan syariat agamanya. Karena sila-sila Pancasila merupakan ajaran-ajaran keislaman.

Demokrasi Sebagai Basis Sosial dan Kulturan Islam Nusantara

Tidak ada sistem politik dan kekuasaan yang diakui keabsahannya oleh dunia selain demokrasi untuk saat ini. Demokrasi juga bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat Islam Indonesia. Dari sebelum hingga Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi menunjukkan kemenangan demokrasi, dari lawannya, rejim otoritarianisme. Demokrasi mengenalkan kemajemukan dan perbedaan berpikir. Kalau kita membaca sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)/PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) perdebatan-perdebatan tentang dasar negara sangat intens. Namun akhirnya sikap dan prinsip yang demokratis yang terpilih, untuk memelihara kemajemukan Indonesia dan memperkuat persatuan.

Demokrasi adalah kekuatan bagi Islam Nusantara, dan Islam Nusantara sesuai dengan demokrasi, karena Islam Nusantara mampu menampilkan keragaman dan kemajemukan, juga pola pikir Islam Nusantara seperti tasamuf (toleran), tawassuth (moderat), *tawazun* (berimbang), *i'tidal* (tegak, konsisten).

Rujukan tertua soal pendapat terhadap sistem politik di Indonesia pada era modern adalah Keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1935 yang menjelaskan tentang definisi Negara Islam (Darul Islam). Menjawab pertanyaan yang diajukan dari muktamirin (yang hadir di muktamar), apakah negeri Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda masih bisa disebut "Negara Islam"? Keputusan Muktamar waktu itu menjawab "masih termasuk Negara Islam" dengan dua alasan yang dikutip dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin pertama,* karena umat Islam masih bisa mempraktikkan ajaran-ajaran (syariat Islam) dan *kedua* dulunya Indonesia pernah dikuasai oleh Kerajaan-Kerajaan Islam (*Ahkamul Fuqaha*, Hasil-Hasil Keputusan Muktamar NU Sejak Tahun 1926). Intinya dari hasil Muktamar itu, memberikan definisi "negara Islam" yang sangat longgar, tidak seperti tuntutan negara Islam seperti yang diperjuangkan oleh kaum "Islamis". Dengan demikian, seperti yang disimpulkan oleh Gus Dur, sejak awal, umat Islam di Indonesia, tidak membutuhkan "Negara Islam".

Disertasi Luthfi Assyaukanie (Ideologi Islam dan Utopia) menunjukkan kelompok-kelompok Islam sejak awal kemerdekaan menerima demokrasi, meskipun berbeda soal penekanannya: Demokrasi Islam, Demokrasi

Agama, Demokrasi Liberal (Sekular). Demokrasi Islam dulu diperjuangkan oleh Masyumi, yang sekarang mungkin oleh PKS, PPP, MUI, Demokrasi Agama adalah fenomena Orde Baru, bagaimana kontrol dan pengaruh agama tetap kuat pada demokrasi, sedangkan Demokrasi Liberal adalah terjaminnya kebebasan, pluralisme, pemisahan yang tegas antara otoritas agama dan negara. Selain tiga varian tadi ada kelompok yang masih menolak demokrasi yang memiliki dua varian, (1) menolak dengan kekerasan, DI/TII zaman dulu, kelompok-kelompok teroris yang melakukan aksi-aksi teror sejak tahun 2002 di Bali dan masih menjadi ancaman sampai sekarang, kelompok-kelompok garis keras yang yang sering melakukan kekerasan seperti FPI, GARIS, MMI, (2) menolak demokrasi tanpa kekerasan seperti gerakan Hizbut Tahrir.

Dari survei-survei publik, kelompok Demokrasi Islam yang sering berkolaborasi dengan kelompok-kelompok garis keras tidak memperoleh simpati publik yang besar, namun dampaknya sangat kuat. Mereka melakukan aksi-aksi teror baik pada pemerintah dan negara serta kelompok-kelompok *civil society* yang bergerak pada isu kebebasan dan HAM agar agenda-

agenda reformasi gagal dan demokrasi di Indonesia tidak terus bergerak maju. Di tengah tekanan-tekanan mereka dan kelemahan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga, demokrasi Indonesia masih berkutat pada model kedua: demokrasi agama. Ini ditunjukkan dengan hasil penelitian Saiful Mujani munculnya "Muslim Demokrat" yang menganut "demokrasi religius".

Apabila dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya seperti Malaysia, Tunisia, Sinegal, apalagi dibandingkan negara-negara Arab di Timur Tengah, Indonesia masih tertinggi (hanya di bawah India), menurut survei Democracy Index yang dikeluarkan Economist (2014) Indonesia masuk kategori *flawed democracy* (tuna demokrasi), belum *full democracy* (demkrasi yang penuh). Namun tidak satupun negara-negara muslim yang menempati kategori teratas "full democracy", hanya 4 negara muslim yang menempati "flawed democracy" sementara lain-lainnya masuk dalam kategori demokrasi yang dikuasai oleh regim, baik rejim yang "dicangkok" (hybrid regime) dan regim yang absolut (authoritarian regime).

Demokrasi: Kebebasan Sipil, Pluralisme dan Toleransi

Pertanyaan mendasar, apakah demokrasi Indonesia akan sampai di sini saja, atau akan terus dimajukan? Beberapa penilaian menunjukkan demokrasi di Indonesia tidak sedang bergerak maju, tapi malah mundur. Misalnya buku yang ditulis secara keroyokan oleh Martin van Bruinessen "Conservative Turn" (Arus Balik Konservativisme) di Indonesia Pasca-Orde Baru. Demikian pula hasil dari pengamatan Ricklefs, "Mengislamkan Jawa" yang menunjukkan masyarakat yang kian terislamkan. Fatwa MUI yang berpengaruh pada Presiden dan lembaga-lembaga negara, kelompok-kelompok "islamis" dan "dakwahis" yang terus memaksakan kehendak dengan menyerang kelompok-kelompok yang berbeda dan minoritas (terhadap Ahmadiyah, Syiah, kelompok yang dituding penganut liberal, sekuler dan pluralis), pelarangan terhadap kesenian-kesenian rakyat, yang menyebakan hilangnya ruang publik yang netral. Intinya hilangnya kebebasan.

Fenomena ini pernah disebut oleh Fareed Zakaria sebagai demokrasi yang tidak liberal *(illiberal democracy)* demokrasi yang tidak bebas. Ada demokrasi, tapi kebebasan tidak ada. Kalau memakai istilah Economist

"demokrasi yang cacat". Demokrasi Indonesia masih dalam kategori "demokrasi yang sakit". Kelompok-kelompok yang ingin memaksakan kehendak itulah yang menyebarkan virus-virusnya. Bagaimana melawannya? Menurut Alexis de Tocqueville tidak ada jalan lain kecuali menambah "dosis demokrasi" untuk melawan penyakit demokrasi. Obat-obat yang bisa diberikan kepada "demokrasi yang sakit" adalah pengakuan terhadap kebebasan sipil, pluralisme, toleransi, kesetaraan dan prinsip-prinsip anti demokrasi. Seperti yang telah diperjuangkan oleh Denny JA "Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori dan Solusi".

Demokrasi tidak hanya dicirikan oleh adanya partai politik dan pemilu yang bebas dan damai, demokrasi yang sehat memerlukan perlindungan terhadap hak-hak individu. Demokrasi adalah jaminan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, memeluk dan menjalankan agama, serta perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Bagaimana agar demokrasi yang sehat terwujud?

Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengepresikan gagasan dan

pikirannya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka SATU-SATUnya sensor terhadap kebebasan berpendapat adalah jika melanggar kebebasan pihak lain. *Kedua,* pluralisme. Kebebasan perlu diiringi penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. *Ketiga,* toleransi. Dengan adanya toleransi, keberagaman individu dalam sebuah teritori, antara minoritas dan mayoritas mendapatkan kenyamanan, harmoni dalam suatu komunitas (Denny JA: 2014, 30).

Inilah tantangan demokrasi ke depan di Indonesia, bagaimana menjadikan demokrasi ini makin sehat, bukan hanya bagaimana menerima dan menyelaraskan Islam dan demokrasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dengan memakai konsep syura (musyawarah) baik dengan dalil Al-Quran dan Haditsnya agar Islam dan demokrasi bisa bersinergi.

Pancasila dan Liberalisme

Hal ini pernah ditunjukkan oleh Gus Dur, saat NU dan ormas-ormas keislaman yang lain sudah menerima

Pancasila sebagai asas, tetapi rejim Orde Baru memandangnya belum cukup. Rejim ini ingin membuat tafsir yang tunggal terhadap Pancasila, tafsir mana yang sesuai, dan mana yang tidak. Salah satu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila adalah demokrasi liberal dan prinsip-prinsip liberalisme. Gus Dur menulis di Kompas dengan judul *Pancasila dan Liberalisme*, 21 Juli 1987, Gus Dur tidak hanya menolak upaya tafsir tunggal Pemerintah terhadap Pancasila, ia menjelaskan prinsip-prinsip liberalisme yang menurutnya tidak ada kontradiksi antara Pancasila dan demokrasi liberal, "orang biasa menjadi Pancasilais dan sekaligus berpandangan liberal":

> Ia adalah filsafat hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan. Ia juga adalah keyakinan akan perlunya secara mutlak ditegakkan kedaulatan hukum. Ia menghendaki perlakuan sama di muka hukum atas semua warga negara, tanpa memandang asal-usul etnis, budaya dan agamanya. Ia bahkan melindungi mereka yang berbeda dari pendapat mayoritas bangsa. Dengan kata lain, liberalisme miliki nilai-nilai yang mendukung

> peradaban yang tinggi. Bahkan secara jujur harus diakui ia menyimpan tujuan-tujuan mulia dan nilai-nilai yang luhur yang dianut Pancasila juga! Kita dapat menjadi Pancasilais dan sekaligus berpandangan liberal.

Penjelasan Gus Dur dapat ringkas dengan beberapa poin, demokrasi adalah (1) hak-hak dasar manusia (2) kedaulatan/supremasi hukum (3) perlakuan yang sama atas warga negara/tidak ada diskriminasi (4) perlindungan terhadap yang minoritas.

Tugas ke depan, bagaimana membahasakan kembali istilah-istilah ini. Hak-hak dan kesetaraan warga negara menjadi istilah yang bisa diterima. Dalam hal ini, prinsip adalah perlindungan dan kesetaraan hak-hak warga tanpa memandang perbedaan agama dan sukunya. Dasar dalam negara bukan perbedaan agama, misalnya dulu antara muslim dan *dzimmi* (non-muslim) tetapi *huquq al-muwathanah* (hak-hak warga negara) seperti yang pernah dituliskan Fahmi Huwaidi, pemikir dari Mesir. Hak-hak warga negara ini pula yang mendasari Piagam Madinah era Nabi Muhammad Saw, yang dituliskan bahwa hak-hak orang beriman (yang percaya pada Nabi Muhammad Saw, yang muslim); hak-hak

suku-suku Arab di Madinah yang belum beriman pada beliau; hak-hak suku-suku Yahudi di Madinah, memiliki hak yang sama, hak hidup, hak menjalankan agamanya, hak yang sama untuk saling melindungi dari serangan musuh.

Kebebasan individu juga diakui oleh Islam, karena kebebasan ini disebut fitrah, semua yang dilahirkan dalam kondisi yang bebas dan suci. Dalam hadits disebutkan *kullu mawludin yuladu alal fithrah—setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi yang suci.* Umar bin Khaththab pernah mengecam perbudakan manusia dengan mengucapkan kata-katanya yang masyhur: *mata ista'badtumun nasa wa waladathum ummahatumum ahraran*—mengapa kamu memperbudak manusia sementara mereka saat dilahirkan orang ibu-ibu mereka dalam kondisi yang bebas? Dalam kaidah Ushul Fiqih juga ditegaskan prinsip: *al-bara'ah al-ashliyah*—kebebasan yang asali. Bahwa kebebasan seseorang hanya dibatasi apabila ia melanggar kebebasan orang lain, *hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati akhihi*—batas kebebasan seseorang adalah (apabila mengganggu) kebebasan orang lain.

Kemajemukan suku dan bangsa merupakan sunnatullah yang kita diajak tidak hanya sekedar toleran, namun saling kenal-mengenal *(li ta'arafu)*.

Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal-mengenal (QS. Al-Hujarat: 13)

Cara pandang dan sikap muslim Nusantara sesuai dengan demokrasi seperti yang pernah dirumuskan KH Ahmad Shiddiq: *tawassuth* (moderat), *tasamuf* (toleran), *tawazun* (berimbang), *i'tidal* (tegak, konsisten) dan amar ma'ruf nahi mungkar (mendorong perbuatan yang baik dan mencegah hal yang merendahkan nilai-nilai kehidupan).

Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Basis Humanis Islam Nusantara

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ingin memuliakan manusia. Rumusan ini mendefinisikan dasar-dasar kemanusiaan yang kini sudah diterima

oleh banyak negara-negara di dunia. Hak asasi manusia (HAM) telah mendapat legitimasi di kalangan Umat Islam. Prinsip-prinsip ini diakui sebagai dasar-dasar ajaran Islam. HAM adalah kekuatan sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi Islam Nusantara. Pengakuan terhadap HAM dalam Islam dimulai dengan penegasan terhadap hak-hak dasar yang disebut *al-dlaruriyat al-khams* (lima dasar): melindungi kepercayaan manusia *(hifdh al-din),* kehidupan *(hifdh al-nafs)*, keturunan *(hifdh al-nasl)*, hak milik *(hifdh al-mal)*, akal pikiran *(hifdh al-'aql)*. Rumusan ini berasal dari Imam Syathibi, ahli Ushul Fiqih.

Nurcholish Madjid memberikan akar tradisi hak asasi manusia (HAM) melalui kajiannya terhadap ayat-ayat Al-Quran (Al-Ma'idah: 27-32), Piagam Madinah dan Khutbatul Al-Wada' (Perpisahan) Nabi Muhammad Saw, pidato pengangkatan Abu Bakar yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui oleh Islam dan menunukkan akar tradisi politik Islam yang berbasis HAM dengan mengakui: egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial (inspirasi dari Robert N Bella).

Adapun tantangan HAM sebenarnya adalah prinsip-

prinsip yang berkatan dengan “kebebasan agama”. Seperti yang pernah ditulis oleh Gus Dur (Islam dan Hak Asasi Manusia) bagaimana sikap muslim terhadap perpindahan agama yang dalam fiqih klasik masih ada ancaman hukuman mati bagi orang murtad? Pertanyaan lain yang juga bisa diajukan, bagaimana dengan hak-hak yang berbeda agama? Masihkah mereka dilihat sebagai “kafir” “musyrik” “sesat” dsb?

Seorang pemikir dari Mesir, Gamal Al-Banna, mengajak kita untuk membaca kembali dasar hukum ini dalam Islam. Perpindahan agama biasa disebut dengan *irtidâd,* orangnya disebut murtad. Masalah ini sudah diulas secara eksplisit dalam Al-Quran. Yang perlu dicatat dengan tegas: tidak ada hukum duniawi untuk kasus ini. Karena Islam mengakui kebebasan beragama, dan keimanan berkaitan dengan kesadaran dan tanpa paksaan, maka perbedaan keimanan tidak bisa diselesaikan dan disikapi dengan hukuman fisik. Oleh karena itu, persoalan kekafiran hingga kemurtadan tidak ada hukuman fisik di dunia ini, berbeda dari kejahatan membunuh, mencuri, menyakiti dan segala hal yang mengurangi dan merampak hak orang lain.

Menurut Muhammad Abid Al-Jâbiri kita harus membedakan antara persoalan *al-riddah* (kemurtadan) ini dengan masalah kebebasan, karena keduanya tidak berhubungan. Masalah kemurtadan dalam sejarah Islam klasik berkaitan dengan peperangan dan penyerangan terhadap umat Islam. Perang Murtad yang dilancarkan Abu Bakar Al-Shiddiq setelah menggantikan Nabi Muhammad Saw merupakan peperangan yang dilancarkan pada kelompok yang tidak saja berkhianat pada komunitas dan negara, tapi mereka ingin memerangi dan menghancurkan komunitas dan negara umat Islam saat itu. Maka orang yang murtad dihukum saat itu bukan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama (yang telah diakui Islam), namun hukuman terhadap pengkhianatan pada umat, negeri dan negara.

Perpindahan dari Islam memang ditentang oleh Allah Swt dengan ancaman murka, laknat dan neraka (nanti di Akhirat), tapi Allah tidak menetapkan hukuman fisik dan duniawi terhadap orang murtad. Hukuman fisik pada orang yang berpindah agama tidak hanya melanggar HAM namun juga kekeliruan membaca teks dan sejarah ajaran Islam. Peristiwa murtad di zaman

sahabat Nabi yang berujung eksekusi bukan karena perpindahan agama atau seseorang yang menyatakan keluar dari keimanan Islam saja, namun suatu tindakan kriminal: berbalik memerangi umat Islam.

Untuk menyikapi perbedaan agama diperlukan rumusan teologi baru, yang bisa dirujuk ke Cak Nur sebagai "teologi inklusif" teologi yang mengakui ada keselamatan di agama-agama yang lain.

Pandangan Islam terhadap Agama-Agama yang Lain

Al-Quran mengakui daya penyelamat agama-agama di luar Islam. Allah meminta penganut agama-agama lain konsisten pada keyakinan mereka, menjalankan aturan dan syariat mereka, tanpa penyelewengan.

*S*ecara eksplisit Al-Quran menyebutkan empat macam agama yang dijamin keselamatannya: Islam, Yahudi, Kristen dan Shabiin. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 62 disebutkan:

Sungguh, mereka yang beriman (Islam), mereka yang menganut agama Yahudi, orang Kristen dan Shabiin, siapa saja yang beriman pada Allah dam Hari Akhir, serta melakukan kebaikan, bagi mereka ada pahala pada Allah, tiada mereka perlu dikuatirkan dan tiada mereka berduka-cita. (QS. Al-Baqarah [2]: 62).

Mayoritas Ahl tafsir mengartikan Sabi'in sebagai kaum penyembah bintang. Tentu saja bintang sekadar simbol yang merujuk pada Tuhan sebagai punca-ibadah. Namun, Ibn Jarir Al-Thabarî dalam tafsirnya, *Jâmi' al-Bayân* mengutip sebuah pendapat: Sabi'in adalah orang yang berpindah-pindah agama untuk mencari Kebenaran. Jika penyembah bintang saja diberi jaminan keselamatan, maka, agama-agama lain yang memiliki keimanan terhadap Tuhan lebih berhak mendapat jaminan keselamatan tersebut. Oleh karena itu agama dan kepercayaan yang diakui tidak terbatas pada agama dan kepercayaan yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Para ulama klasik dan penguasa terdahulu mengiaskan agama dan kepercayaan dengan agama dan kepercayaan yang disebutkan Al-Quran itu. Ada tiga "kategori" penting untuk agama yang disebutkan keselamatannya, yakni (1) percaya pada Tuhan (2)

percaya pada Hari Akhir, yang merupakan Hari Perhitungan, Hari Pembalasan (3) melakukan kebaikan.

Prinsip pluralitas jalan keselalamatan itu dari surat Al-Baqarah ayat 62 dipertegas kembali dengan narasi yang hampir sama dalam surat Al-Mâ'idah (5) ayat 69:

Sungguh, orang yang beriman, dan orang yang menganut agama Yahudi, orang Shabiin dan Kristen—siapa saja yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan melakukan amal kebaikan, tiada mereka perlu kuatirkan dan tiada mereka berduka cita.

Menolak Pengafiran

Pengafiran adalah diskriminasi dalam internal umat Islam. Dengan menyebut yang berbeda aliran dan kelompok yang lain sebagai kafir maka berarti telah memandang mereka tersesat dan keluar dari Islam. Muncul kleim bahwa pendapat dan kelompoknya paling benar sendiri, yang lain sesat dan menyesatkan. Yang merasa paling benar akan merasa paling tinggi dari yang lain. Sedangkan pihak yang dituding kafir lebih rendah bahkan terkutuk. Inilah bahaya dari pengafiran.

Seharusnya pengafiran dijauhkan sejauh-jauhnya dalam Islam. Berbeda bukan berarti tersesat, perbedaan bukan penodaan namun adalah keniscayaan.

Mengapa pengafiran harus ditolak? Selain karena merupakan pandangan dan sikap yang diskriminatif, tidak demokratis dan bertentangan dengan kebebasan beragama seseorang (HAM), juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam:

Pertama, hanya Allah yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian, siapa yang beriman dan kafir, siapa yang lurus dan siapa yang menyimpang.

Sungguh, Tuhanmu, Ia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Ia yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl [16]: 125).

Kedua, perbedaan yang ada merupakan ketetapan Allah. Karena kalau Dia berkehendak akan menjadikan seluruh umat ini menjadi satu golongan saja, namun Dia berkehendak sebaliknya berbeda-beda yang tujuannya "berlomba-lomba dalam kebaikan" bukan berlomba-lomba dalam mengafirkan dan menyesatkan pihak yang berbeda.

Bagi masing-masing daripadamu (Kami tentukan) aturan dan cara, sekiranya Allah berkenan tentulah Ia jadikan kamu satu umat, tapi maksudnya menguji kamu dalam apa yang diberikan-Nya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah kamu kembali semuanya, dan Dia lah yang akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-Mâ'idah [5]: 48).

Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang relasi antar-agama, namun kita tidak bisa menutup mata dalam internal agama Islam juga tumbuh pelbagai macam aliran dan kelompok. Kalau dengan pihak "luar" umat Islam diajak memandang secara positif, apalagi dengan perbedaan internal sendiri.

Ketiga, larangan mengafirkan sesama muslim yang bersumber dari aturan Nabi Muhammad Saw.

Barang siapa yang menuduh seseorang (muslim) dengan kekafiran atau mengatakan padanya "musuh Allah" padahal ia bukan seperti itu, maka tuduhan itu berbalik pada penuduhnya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pengafiran sering disertai fatwa pembunuhan. Padahal seorang muslim haram darah, harta dan kehormatannya.

Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. (HR. Muslim).

Prinsip-Prinsip Kemuliaan Manusia dalam Al-Quran

Pengakuan kesetaraan dan tanpa diskriminasi merupakan doktrin-doktrin yang penting dalam Islam.

Pertama, pengakuan kemuliaan manusia tanpa pandang agama, golongan, suku, gender dan atribut-atribut lainnya merupakan ketetapan Allah Swt.

*Sungguh, **telah Kami muliakan bani Adam**, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami **utamakan** mereka melebihi sebagian besar makhluk yang Kami ciptakan.* (QS. Bani Isra'il [17]: 70).

Penegasan kemuliaan manusia bukan pilihan, tapi ketetapan dari Tuhan yang menciptakan manusia dan dasar keimanan kepada-Nya. Tuhan lah yang menganugrahkan kemuliaan pada manusia.

Kedua, setiap manusia memiliki kehidupan, jiwa dan ruh yang berasal dari Tuhan.

Dan (ingatlah) ketika berfirman Tuhanmu kepada para malaikat, "Akan Kuciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang diberi bentuk, Maka apabila Kubentuk rupanya dan Kutiupkan Roh-Ku ke dalamnya, tuntuklah sujud kamu kepadanya." (QS. Al-Hijr [15]: 28-29).

Ketiga Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan rupa, manusia adalah "karya" Allah yang terbaik, yang tidak boleh direndahkan.

Sungguh, telah Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik acuan (QS. Al-Tîn [95]: 4)

Ayat-ayat ini adalah argumentasi yang sangat jelas dan tegas bahwa *kemuliaan* dan *keutamaan* yang Allah berikan pada manusia secara umum. Kemuliaan dan keutamaan manusia tanpa pengecualian. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, suku, status sosial, agama, aliran kepercayaan, afiliasi politik semuanya memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kemanusiaan berlaku umum dan universal. Oleh karena itu Al-Quran menggunakan istilah yang umum: *al-nâs, al-insân, al-basyar* yang berarti manusia atau *banî Âdam* yang berarti anak-anak Adam untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan manusia secara universal.

Kemuliaan ini melekat pada manusia sebelum ia lahir saat masih dalam kandungan hingga sampai ia wafat. Jenazah manusia, apapun agamanya harus diperlakukan secara layak dan dihormati. Saat iring-iringan yang membawa jenazah seorang yang beragama Yahudi Nabi Muhammad Saw berdiri untuk memberikan penghormatan.

Prinsip kemuliaan manusia tidak disangkal kecuali oleh iblis.

Maka sujudlah para malaikat semuanya, bersama-sama, kecuali iblis, ia enggan bersama (malaikat) yang sujud. (QS. Al-Hijr [15]: 30-31).

Kemuliaan yang melekat pada setiap orang yang tidak bisa direnggut dan dirampas, karena kemuliaan ini diberikan langsung oleh Tuhan, dan tidak ada yang menolak kemuliaan manusia kecuali iblis.

HAM dalam UUD

Bila tidak mau mengakui adanya keselamatan pada agama-agama yang lain, belum mampu dan bisa memiliki

teologi yang inklusif, maka sikap toleran *(tasamuh)* harus dikedepankan. Atau yang seperti diutarakan oleh Gus Dur, yang membela kelompok-kelompok minortas keagamaan, seperti Ahmadiyah, Syiah, Konghucu dengan argumentasi hak konstitusional. Bahwa hak-hak mereka diakui oleh Konstitusi kita (Bab XA Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A-28J, dan Pasal 29 ayat 2 tentang Agama).

Pasal 28D

(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan..
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

BAB VI

PENUTUP

Perdebatan tentang Islam Nusantara rupanya menggairahkan secara linguistik dan menggugah secara epistemologis. Percakapan tentangnya begitu riuh. Ada yang pro, di samping yang kontra. Bagi yang kontra, Islam tak perlu dinusantarakan. Justru nusantaralah yang harus diislamkan. Sebab, sekiranya Islam (al-Qur'an) merupakan wahyu yang bersifat sakral dan universal, maka budaya nusantara adalah produk manusia yang profan dan partikular. Argumen mereka jelas, tak mungkin yang sakral dan yang universal ditundukkan pada sesuatu yang profan dan yang partikular. Justru yang harus dilakukan adalah sebaliknya; mengislamkan Nusantara. Sampai di sini, apa yang dikemukakan pihak kontra itu tentu tak salah jika dilihat dari sudut pandang agama Islam. Hanya pertanyaannya, bagaimana pengislaman Nusantara itu dilakukan?

Sejarah menunjukkan seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung

tanpa pertumpahan darah. Dalam menyebarkan Islam salah satu cara yang ditempuh para ulama adalah mendialektikkan Islam dengan kebudayaan. Dengan perkataan lain, hubungan antara Islam dan kebudayaan merupakan hubungan dialektik (*`alaqah jadaliyah)* bukan hubungan dominatif (*`alaqah ikhda`*). Yang satu tak melenyapkan yang lain.

Di Sumatera Barat, hukum waris Islam yang patrilineal dikompromikan dengan adat Minangkabau yang matrilineal. Tak jarang para ulama menggunakan perangkat kebudayaan sebagai media untuk mendakwahkan Islam. Alih-alih mengharamkan wayang dan gamelan, para wali justru menggunakan keduanya sebagai sarana dakwah Islam.

Dengan menggunakan cara *bil hikmah wal mau`idah al-hasanah wal mujadalah bil husna,* para ulama berhasil mengislamkan Nusantara. Dengan dakwah seperti ini, penduduk Nusantara--meminjam bahasa al-Qur'an--*yadkhuluna fi dini Allah afwaja* (mereka berbondong-bondong masuk Islam). Mungkin benar, Islam masuk ke Nusantra sejak abad ke 13 M. Namun, yang memeluk Islam saat itu diperkirakan hanya para pedagang dari luar. Sementara penduduk asli Nusantara

masih memeluk agama-agama lama. Berbagai sumber menyatakan bahwa pemelukan Islam secara masif dari orang-orang Nusantara baru terjadi dua abad berikutnya, yaitu pada era Wali Songo.

Keberhasilan dakwah wali songo itu mencengangkan dan menjadi renungan para kiai NU dalam kurun waktu lama. Tak sedikit dari mereka yang bertanya-tanya; apa yang istimewa dari dakwah para wali itu sehingga banyak orang melepas agama lamanya dan berpindah ke agama baru, Islam. Setelah mempelajari sejarah, para pengusung Islam Nusantara berkesimpulan bahwa dakwah para wali itu mengikuti pola dakwah Nabi Muhammad; Islam disebarkan dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Para wali lebih mendahulukan cara dialog ketimbang konfrontasi. Masyarakat kerap dibiarkan menjalankan tradisi leluhurnya sambil sedikit demi sedikit ajaran tauhid diinjeksikan ke dalamnya. Memberantas kemungkaran pun tak dilakukan dengan cara-cara mungkar (*al-nahyu `an al-munkar bi ghair al-munkar*).

Mengikuti pola turunnya wahyu yang tak sekaligus, para sufi Nusantara tak memaksa orang-orang yang baru masuk Islam untuk langsung melaksanakan

syariat secara penuh. Syariat Islam dijalankan setahap demi setahap mengikuti tingkat kesiapan masyaratakat. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad, Islam didakwahkan para wali itu secara bertahap (*al-tadrij fi al-tasyri`*), tak memberatkan (*`adam al-haraj*), dan tak banyak beban (*taqlil al-takalif*). Cara-cara ekstrem (*tatharruf*) dalam penyelesaian masalah dijauhi para wali. Menurut KH Said Aqil Siradj, dalam menyebarkan Islam, para sufi Nusantara berdiri di atas prinsip toleransi (*tasamuh*) dan moderatisme (*tawassuth*). Dengan prinsip toleransi, Sunan Kudus pernah melarang umat Islam menyembelih sapi khusus daerah Kudus Jawa Tengah sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang Hindu yang memercayai kesucian binatang tersebut.

Itulah kesimpulan para kiai ketika membaca metode dakwah dan melihat ekspresi keberislaman yang diteladankan para wali di Nusantara dulu. Menurut saya, jika itu yang menjadi narasi utama Islam Nusantara, maka pro-kontra di atas tak diperlukan. Sebab, baik yang pro maupun yang kontra sesungguhnya tak sedang mempertentangkan sesuatu. Mereka hanya membicarakan sesuatu dari ranah berbeda. Sekiranya

kelompok kontra Islam Nusantara berbicara pada tataran normatif-ideal, maka para pengusung Islam Nusantara itu berbicara pada tataran riil-empirikal. Tentu, sesuatu yang ideal itu tak boleh dibiarkan--meminjam bahasa Kiai Afifuddin Muhajir--"hanya menggantung di langit". Sesuatu yang ideal itu harus dibawa ke ruang yang lebih realistis. Dalam konteks itu, para wali tak ragu untuk "menusantarakan" hal-hal tertentu dalam Islam.

Disebut "hal-hal tertentu", sebab tak semua hal dalam Islam bisa dinusantarakan. Sebagaimana diketahui, Islam memiliki dua jenis ajaran. *Pertama*, adalah ajaran yang tetap-tak berubah (*al-tsawabit*). Aqidah adalah salah satu hal dari *al-tsawabit* tersebut. Umat Islam dimanapun misalnya harus meyakini tentang keesaan Allah SWT, kenabian Muhammad SAW, dan kewahyuan al-Qur'an al-Karim. Tak bisa dengan alasan budaya, umat Islam Nusantara menolak ajaran tauhid-monoteisme. Dimana pun berada, syahadat umat Islam adalah sama, *asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*. Dengan ini jelas, tak ada aqidah Islam Nusantara yang distingtif dengan aqidah umat Islam lain.

Contoh lain adalah soal shalat. Dalam pokok soal ini, Islam Nusantara tak masuk pada syarat dan rukun shalat. Tak bisa dengan alasan budaya, bacaan shalat diganti dengan tembang Nusantara. Terkait shalat, yang bisa dinusantarakan adalah soal tempat pelaksanaan shalat dan pakaian penutup aurat dalam shalat. Apakah umat Islam misalnya boleh membangun mesjid dengan desain dan arsitektur gereja atau pura. Begitu juga, soal bentuk mukena dan pakaian yang menjadi penutup aurat seorang muslim dalam shalat. Dalam dua perkara itu, Islam bisa berdialektika dengan kebudayaan. Di Jawa dan Madura misalnya laki-laki muslim biasanya mengenakan sarung ketika shalat. Sunan Kudus membangun mesjid menyerupai bentuk pura di Bali.

Kedua, adalah ajaran yang tidak tetap dan berubah (*al-mutaghayyirat*). Jenis ajaran kedua ini sebagian besar berada pada domain *mu`amalah*, *siyasah* (politik), dan *`urf-ijtima`i* (sosial-budaya). Pada bidang ini, Islam sesungguhnya lebih banyak bicara mengenai prinsip-prinsip etis-moral seperti *tahqiq al-`adalah* (mewujudkan keadilan), *syura baynahum* (musyawarah), *ishlah dzati al-bayn* (perdamaian), *mu`asyarah bi al-ma`ruf* (pergaulan yang baik),

wujud al-taradhi (adanya kerelaan), *izalah al-dharar* (menghilangkan kemudaratan), *`adam al-ikrah* (tak ada pemaksaan), dan *`adam al-gharar* (tak ada penipuan). Intinya, seluruh hal terkait relasi antar manusia, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga negara harus didasarkan pada prinsip menarik maslahat (*jalbu al-mashlahah*) dan menolak mafsadat (*dar'u al-mafsadah*).

Prinsip-prinsip itulah yang menjadi acuan etis para pengusung Islam Nusantara dalam merespons problem-problem sosial-ekonomi dan politik di masyarakat. Misalnya, ketika baru merdeka, Indonesia terjebak dalam dua pilihan sulit; menjadikannya sebagai negara Islam atau sebagai negara sekuler. Jika yang satu memaksakan negara Islam, maka yang lain memaksakan negara sekular. Tarik menarik di antara keduanya cukup keras hingga ditemukan satu traktat politik, Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia bisa selamat dari ancaman perpecahan dan peperangan sesama anak bangsa. Mengacu pada kaidah fikih, menolak terjadinya kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam `ala jalbi al-mashalih*), NU menerima Pancasila. Bahkan, Pancasila

dinilai para kiai NU sebagai ajaran yang selaras dengan Islam sekalipun dalam proses produksinya tak selalu diacukan pada dalil-dalil al-Qur'an.

Begitu juga ketika sebagian umat Islam Indonesia gamang apakah akan menerima konsep Hak Asasi Manusia atau menolaknya. Para kiai berkumpul dan bersepakat bahwa ada sub bahasan di dalam kitab kuning yang bisa menjadi rujukan hak asasi manusia dalam Islam yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams* (lima pokok ajaran), yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara akal (*hifzh al-`aql*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara kehormatan-keturunan (*hifzh al-`irdh wa al-nasab*). Lima ajaran pokok ini di samping didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, juga dilandaskan pada pidato Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada` yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga jiwa, harta, dan kehormatan (*inna dima'akum wa amwalakum wa a`radhakum haramun `alaikum kahurmati yawmikum hadzi wa syahrikum hadza wa baladikum hadza*). Dengan paparan di atas, maka tak seharusnya Islam Nusantara ditampik.

Lebih dari itu, Islam Nusantara telah menjadi identitas keislaman yang khas di Indonesia yang merujuk pada keragaman adat dan budaya di Nusantara dengan menampilkan kekhasan, keunikan, dan keistimewaan sebagai bagian dari proses "pribumisasi" Islam dengan konteks lokal. Nusantara dengan 17.000 pulau dan ribuan suku telah memberikan keragaman pemahaman dan pendekatan terhadap penghayatan Islam, yang masing-masing unik, khas dan mencerminkan perpaduan Islam dengan kearifan-kearifan lokal.

Dari kajian sejarah bisa disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah:

1. Islam yang mengutamakan kesinambungan dan kontinuitas dengan budaya lokal (kita bisa saksikan era Wali Songo).

2. Islam yang mampu menampilkan keragaman-keragaman melalui relasinya dengan anasir-anasir lokal, karena kita telah tahu, Nusantara sangat beragam, baik dari warisan sejarah maupun pengaruh geografis dan kawasan. Batasan di sini adalah "syariat Islam" (sesuai tafsir yang dianggap otoritatif), apabila

sesuai dengan syariat akan diadopsi *(al-aadah muhakkamah:* adat adalah hukum*)*, bila bertentangan ada tiga sikap: (a) toleran (membiarkan dan menghormati asal tidak mengganggu, (b) membentuk subkultur [benteng] dalam masyarakat seperti: pesantren) atau (c) melakukan perubahan secara bertahap dan menjauhi kekerasan.

3. Islam yang melakukan perubahan dan pembaruan (transformasi) dengan mengedepankan perubahan yang terbatas, tidak radikal, ekstrim, menjauhi cara-cara kekerasan dan mencari "jalan tengah" "kompromi" dan "sintesis"

4. Islam yang bertransformasi sebagai kekuatan kebangsaan dan kemajuan (era Kemerdekaan Indonesia, khususnya ide-ide Bung Karno tentang Islam).

5. Jalur dakwah Islam Nusantara melalui: pendidikan, pelayanan sosial, kesenian dan budaya serta kegiatan-kegiatan kultural lainnya.

6. Karakter Islam Nusantara adalah moderat *(tawassuth)*, tidak ekstrim, dan tidak radikal, selalu mencari "jalan tengah" dan "sintesis".

7. Karakter Islam Nusantara adalah toleran *(tasamuh)* dan menjauhi fanatisme *(ta'ashshub)* dan kekerasan.

Selain itu Islam Nusantara juga memiliki sinergi dengan nilai-nilai esensial Islam, kelenturan syariat Islam dan adopsi terhadap kearifan lokal, menjadikan Pancasila sebagai basis ideologis dalam bernegara, menjadikan demokrasi sebagai basis sosial dan kultural, serta mengambil prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai basis kemusiaan.

Bukan kesimpulan yang mengada-ada kalau kami menegaskan bahwa Islam Nusantara telah berhasil menjembatani sejumlah ketegangan antara Islam dan budaya, Islam dan Negara Bangsa, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi, Islam dan Hak Asasi Manusia.

Keberhasilan ini bisa dicapai karena kecakapan Islam Nusantara dalam meramu dalil normatif Islam (*fiqh al-nushush*) dengan fakta-fakta empirik di lapangan (*fiqh al-waqi`*). Dengan demikian, sampai kapan pun, dalam mengoperasikan Islam Nusantara, para ulama perlu memperhatikan *nash* al-Qur'an-hadits dan konteks sosial-ekonomi-politik secara sekaligus. Dengan cara ini kiranya fatwa ulama Nusantara tak hanya membuahkan maslahat bagi umat Islam secara terbatas di Indonesia melainkan justru sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

epilog

ISLAM NUSANTARA:
Beberapa Tambahan Pemikiran

Ulil Abshar Abdalla

Upaya yang dilakukan oleh Mohamad Guntur Romli dan teman-teman Ciputat School untuk mendefinisikan dan merumuskan isi istilah Islam Nusantara sangat layak diapresiasi. Sebagaimana semua istilah yang baru diperkenalkan, problem terbesar adalah bagaimana mendefinisikannya, dan mengisinya dengan isi substantif yang kokoh dan koheren. Ini bukan pekerjaan mudah. Yang ditulis di buku ini baru usaha awal. Ini tak menutup kemungkinan bahwa pihak lain akan menambahkan pengertian yang lain yang bisa memperkaya.

Jika saya tak keliru meringkaskan seluruh dalam buku ini, ide Islam Nusantara bisa disederhanakan dalam tiga ide dasar: (1) Islam yang menjaga kontinyuitas dengan, dan sekaligus bisa berdamai dengan budaya-budaya

lokal; (2) Islam yang bisa berdamai dengan bentuk negara bangsa; dan (3) Islam yang bisa berdamai dan bersenyawa dengan konteks global dalam bentuk nilai-nilai universal yang diterima sebagai "*urf* internasional" saat ini – demokrasi, HAM, dan hak-hak sipil. Dengan kata lain, Islam Nusantara adalah Islam yang tegak atas pokok-pokok dokrtrinalnya sendiri (tauhid, syariat, akhlak), tetapi sekaligus dihidupi oleh tiga konteks utama: konteks lokal, konteks nasional, dan konteks global.

Saya hanya ingin memperkaya perspektif ini dengan menambahkan sejumlah gagasan lain.

Yang pertama: Jika Islam Nusantara kita rumuskan secara demikian, maka ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang "mengkhianati" tradisi formasi ajaran dan praktek Islam selama ini, sejak zaman awal, klasik, hingga modern. Apa yang kita sebut Islam pada dasarnya mengandung tiga elemen penting. Ini sudah ada sejak zaman Islam awal, sejak Islam lahir ke dalam arena sejarah di tanah Arab dahulu. Perhatian umat Islam selama ini cenderung tertuju kepada salah satu elemen itu, seraya mengabaikan elemen yang lain.

Ketiga elemen itu adalah: elemen *doxa* atau ajaran pokok, elemen praktek, dan elemen peradaban. Saya membedakan antara praktek dan peradaban, dengan keterangan yang segera akan saya berikan nanti. Elemen doktrin, kita sudah tahu apa isinya. Di sini kita berjumpa dengan doktrin *tauhid*, hukum-hukum kanonik yang disebut fikih dan etika kehidupan, baik personal maupun sosial.

Elemen praktek adalah Islam yang diterjemahkan dalam *sunnah* sebagaimana pernah didefinisikan oleh Fazlur Rahman dulu. Sunnah, kalau boleh saya memberi formulasi ulang atas istilah itu, adalah penerjemahan doxa, hukum dan ajaran-ajaran etis Islam dalam konteks Madinah dan kehidupan bangsa Arab pada abad ke-7 Masehi. Elemen praktek atau sunnah ini kira-kira sejajar dengan elemen pertama dalam pengertian Islam Nusantara yang ditulis di buku ini: yaitu kontinyuitas dan kemampuan berdamai dengan kultur lokal. Jika kita telaah elemen sunnah dalam sejarah pembentukan ajaran Islam, akan kentara sekali pengaruh-pengaruh budaya Arab yang tetap dipertahankan oleh Nabi.

Sementara elemen ketiga, yaitu peradaban, adalah penerjemahan Islam dalam konteks pengaruh-

pengaruh budaya "global" pada zaman itu. Di sini, kita harus menyebut dua pengaruh penting, yaitu Yunani dan Persia. Islam berkembang sebagai sebuah *hadarah*, peradaban bukan karena elemen doxa, atau elemen sunnah, tetapi karena mampu menyerap pengaruh-pengaruh global pada zamannya. Elemen peradaban ini sejajar dengan konteks global dalam definisi di buku ini tentang Islam Nusantara.

Dengan kata lain, proses pembentukan Islam Nusantara, entah sebagai ajaran, praktek atau "peradaban", sejatinya mengulang proses serupa yang berlangsung pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di masa lampau. Menurut saya, sejak dahulu Islam berkembang dalam tiga kerangka itu. Katakan saja, inilah "trinitas" Islam yang selalu terulang kapan pun, dan di manapun. Kemanapun pergi, Islam harus bisa mengembangkan diri dalam kerangka tiga konteks tadi itu: lokal, nasional, dan global, seraya tetap mempertahankan *doctrinal core*-nya. Tentu saja takaran tiga konteks ini dalam artikulasi Islam di waktu atau tempat tertentu bisa berbeda-beda. Ada suatu waktu di mana beban doktrin terlalu kuat, sehingga Islam gagal atau kurang berhasil mengembangkan diri sebagai "*genius*" baru dalam

konteks lokal dan global yang baru. Inilah yang disebut dengan Islam yang skripturalis. Sementara ada situasi lain di mana Islam terlalu bersemangat menyesuaikan diri dengan konteks lokal/nasional/global sehingga sebagian umat ada yang keberatan, karena agamanya terlalu kebablasan mengalami proses "*aggiornamento*" atau penyesuaian diri dengan zaman, sehingga perlu di-rem sedikit. Sejarah Islam menyaksikan goyangan pendulum yang selalu mengayun seperti ini.

Yang kedua: Saya melihat bahwa praktek Islam yang sekarang kita beri nama Islam Nusantara itu sudah secara baik mengembangkan diri dalam dua konteks: lokal dan nasional. Tetapi konteks global masih belum banyak dikembangkan dengan serius dalam diskursus keislaman yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang menyokong ide Islam Nusantara. Katakanlah di pesantren atau perguruan-perguruan tinggi Islam. Yang saya maksud adalah: selama ini umat Islam di Indonesia sudah cukup sukses mengembangkan diri sebagai komunitas agama yang bisa berdamai dengan konteks tradisi setempat melalui dakwah-dakwah para "*local saints*" atau (dalam konteks Jawa) Wali Sanga. Yang kita butuhkan ke depan adalah "wali sanga" jenis

lain yang mampu mereplikasi pekerjaan sebelumnya dalam konteks lokal ke dalam konteks baru yang lebih luas: konteks global. Kita bukan saja butuh wali sanga yang bisa menerjemahkan Islam dalam bahasa wayang dan tradisi *selametan* di Jawa. Tetapi kita juga butuh wali sanga yang bisa merumuskan ajaran-ajaran Islam yang sudah didialogkan dengan ide-ide baru seperti demokrasi, HAM, hak-hak sipil.

Tugas merumuskan Islam sebagai sunnah atau Islam yang berdamai dengan konteks lokal bisa dikerjakan oleh para juru dakwah, para sufi, para pedagang, dan orang-orang yang boleh kita sebut sebagai "*the engineers of Islam*", mereka yang melakukan rekayasa atas Islam agar "*resonate*" atau nyambung dengan konteks setempat. Sementara itu, tugas merumuskan Islam yang bisa berdamai dengan konteks global biasanya dilakukan oleh "*Muslim scientists*", para ilmuwan Muslim. Di masa lampau, tugas ini dikerjakan oleh orang-orang macam Ibn Sina, al-Farabi, Ibn Rushd, Ibn Bajah, Al-Razi, dll. Mereka adalah orang-orang yang pada zamannya melakukan upaya untuk mendamaikan Islam dengan peradaban global. Mereka menerjemahkan gagasan-gagasan dari Yunani dan memberinya "bungkus" Islam.

Mereka ini bukan para wali, tetapi biasa disebut sebagai *hukama'*, para failasuf.

Peran kekuasaan politik juga sangat penting dalam memberikan proteksi terhadap para hukama' untuk mengembangkan Islam sebagai peradaban. Tanpa dukungan semacam ini, para hukama' itu sudah tentu akan diberangus oleh kaum ortodoksi yang hanya ingin melihat Islam melulu sebagai agama yang taat secara penuh kepada *doxa*-nya sendiri, tanpa pengaruh-pengaruh koruptif dari luar.

Dengan kata lain, dimensi yang masih kurang dalam praktek Islam Nusantara ini adalah pada aspek perumusan dan sekaligus penyebaran diskursus Islam yang berwawasan demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil. Banyak sarjana Muslim yang mencoba merumuskan Islam yang bisa "*compatible*" dengan diskursus baru mengenai HAM. Salah satunya yang layak disebut adalah Abdulaziz Sachedina dalam bukunya *Islam and the Challenge of Human Rights* (2014) dan Abdullahi Ahmed An Naim. Tetapi, rumusan-rumusan yang mereka perbuat belum menjadi bagian dari "*Muslim's public sensitivity*" secara luas. Ini bisa dideteksi, misalnya, melalui kenyataan bahwa masih banyak umat Islam

yang gagal menempatkan hubungan antara negara, agama dan kelompok-kelompok yang mereka anggap "menyimpang" atau "sesat". Banyak umat Islam yang memahami tugas negara masih dalam kerangka negara tradisional yang dikembangkan oleh orang-orang seperti Imam Ghazali, misalnya. Dalam pandangan Ghazali, negara punya tugas untuk menjaga agama (*hirasat al-din*). Menjaga agama di sini mencakup, antara lain, melindungi umat dari paham-paham yang menyimpang. Dalam konsepsi semacam ini tentu saja negara diharuskan masuk sebagai "*the arbiter of sectarian dispute*", hakim dalam perselisihan doktrinal dalam tubuh umat Isalm. Saya melihat, masih banyak umat Islam yang memiliki pandangan tentang negara yang super-protektif semacam ini.

Saya menyambut usaha yang dilakukan Teman-Teman Ciputat School, antara lain karena mencoba mendorong gagasan Islam Nusantara agar tidak berhenti sebagai diskursus Islam lokal/nasional, tetapi juga masuk pada wilayah yang lebih luas: Islam dalam konteks global yang harus berhadapan dengan isu-isu kontemporer.

"*Khilafiyyat*" atau perselisihan kita sekarang bukan lagi soal qunut, tahlil dan selametan. Melainkan soal-

soal yang dimensinya lebih eksistensial dan mencakup kemaslahatan manusia yang lebih luas. Misalnya, soal hak-hak orang-orang yang memeluk pandangan yang "sesat" untuk meng-*exercise* atau melaksanakan kebebasan-agamanya. Apakah orang-orang Ahmadiyah memiliki hak untuk menikmati kebebasannya sebagai warga negara untuk menyelenggarakan keyakinannya? Apakah perlakuan kita terhadap perempuan sudah secara konsisten sesuai dengan prinsip kesetaraan jender? Apakah poligami bisa ditolerir atau tidak? Apakah pernikahan usia dini bisa disahkan, karena melibatkan *minor* atau subyek di bawah umur yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan "*consent*" atau persetujuan? Apakah perempuan harus dikhitan (*genital mutilation*)? Apakah kepercayaan-kepercayaan lokal yang bertaburan di seluruh tanah air kita sudah mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan *the so-called* "agama-agama resmi"? Apakah kita sudah cukup adil memperlakukan mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda? Apakah kita mengizinkan homofobia atas nama agama? Bagaimana kita memahami tradisi-tradisi tekstual kita yang bernada homofobik? *Et cetera, et cetera*.

Itulah “khilafiyyat” baru yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh oleh umat Islam sekarang. Dan ini harus menjadi bagian dari percakapan Islam Nusantara.

Yang ketiga: Yang kurang mendapatkan tekanan dalam rumusan di buku ini adalah peran agama sebagai “nurani” masyarakat. Ini istilah yang sudah klise, dan perkenankan saya menjelaskannya agak sedikit lebih detil. Saya memandang bahwa *raison d'être* atau alasan kelahiran agama sejak awal adalah sebagai protes atas *status quo*. Agama-agama umumnya lahir sebagai koreksi atas keadaan yang tidak ideal, bukan melakukan legitimasi atas yang ada. Agama adalah gagasan yang membawa kepada masyarakat pada suatu zaman tertentu bahwa “*another world is possible*”, bahwa dunia alternatif yang lebih baik mungkin diciptakan. Apa yang sudah ada disangkal oleh agama-agama karena dianggap kurang mencerminkan dimensi ketuhanan yang adil dan indah. Dunia yang ada, *the power that be*, adalah *ugly*, buruk, dan karena itu agama datang dengan tugas profetik untuk mengoreksinya.

Saya berpandangan bahwa merumuskan Islam semata-mata dalam keranga “*Is Islam compatible with democracy*” memang kurang memadai. Pertanyaan itu

penting. Tidak saya sangkal. Tetapi ada pertanyaan lain yang juga penting: *What can Islam offer to rectify the practices of injustice in the existing status quo?* Apa yang Islam, sebagai agama, bisa suguhkan kepada dunia modern sebagai kekuatan korektif atas praktek-praktek ketidak-adilan yang ada saat ini. Dengan seluruh kemajuan-kemajuan yang pesat dalam dunia modern sekarang, tetap saja pertanyaan tentang ketidak-adilan masih terus relevan. Agama adalah "*the conscience of the age*", nurani zaman yang ditantang untuk bersikap *alert*, awas terhadap segala bentuk ketidak-adilan semacam ini.

Tugas agama tentu bukan mencarikan solusi teknis atas ketidak-adilan itu. Sama sekali bukan. Itu adalah tugas para pakar dan praktisi. Tugas agama adalah seperti yang dikerjakan para nabi sejak dahulu kala: teriak pada saat sesuatu tidak beres; *when something has gone wrong!* Peran agama semacam ini memang bisa menjadikan dirinya sebagai "*nuisance*" atau gangguan yang menjengkelkan pada segala bentuk status quo yang ada. Tetapi memang begitulah "beban peradaban" yang dipikul oleh agama sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya Quran berkali-kali mengingatkan tentang

fakta sejarah di masa lampau di dalam bangsa Israel. Dalam sejarah bangsa Israel, nabi-nabi selalu dibunuh oleh kaumnya sendiri, sebab mereka menyuarakan "nurani zaman" untuk mengkritik status quo yang ada. *Wa yaqtulun al-anbiya'* – mereka (orang-orang Yahudi) kerap membunuh para nabi (Bdk. QS 2:61; 3:21; 3:112). Itulah *refrain* yang selalu berulang dalam Quran. Ini bukan kritik yang semata-mata diarahkan kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini. Ini adalah peringatan Quran tentang sebuah fakta bahwa di mana-mana orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai "*the conscience of the age*", suara moral di zamannya, akan selalu dimusuhi dan "dibunuh" oleh masyarakatnya sendiri. *Dibunuh* tidak harus berarti pembunuhan fisik; tetapi bisa saja berarti pembunuhan dalam pengertian metaforis: pemberangusan hak berbicara, misalnya.

Yang keempat dan terakhir: Gagasan Islam Nusantara hanya bisa bermakna secara kemanusiaan jika memperhitungkan dimensi penting yang menjadi tantangan manusia zaman ini: yaitu merawat lingkungan. Kesadaran bahwa kita manusia sebagai manusia adalah bagian dari mata-rantai kosmis yang saling tergantung

(manusia-binatang-lingkungam-bumi-alam raya) harus menjadi bagian dari kesadaran beragama zaman sekarang. Di sini agama-agama "besar" yang mapan perlu belajar dari kebijaksanaan lokal dalam bentuk cara berpikir holistik: bahwa kita adalah bagian dari mata rantai wujud yang besar dan saling tergantung. Holisme semacam ini bertentangan dengan corak berpikir yang dominan saat ini, di mana manusia modern cenderung memandang alam di sekitarnya secara fragmentairs, sebagai unit-unit kecil yang saling terisolasi, saling terpisah, saling tak terhubung satu dengan yang lain.

Diskursus cinta yang harus kita kembangkan sebagai seorang Muslim bukan saja cinta yang secara "monolitik" tertuju kepada sesama manusia saja. Cinta sesama sangat baik. Tetapi cinta kita juga harus diarahkan kepada wujud-wujud lain yang sangat beragam: binatang (kucing atau anjing, misalnya), lingkungan, bumi, kosmos/alam raya. Kepekaan kita sebagai Muslim kepada binatang sebagai "co-*habitant*," sesama penghuni bumi, juga harus dikembangkan, sama dengan kita mengembangkan wacana mengenai *ukhuwwah imaniyyah, wathaniyyah, dan basyariyyah*. Persaudaraan yang dirumuskan oleh Kiai Achmad Siddiq itu sudah

bagus, tetapi masih belum holistik, menyeluruh. Kita juga harus mengembangkan apa yang ingin saya sebut sebagai *ukhuwwah khalqiyyah*, persaudaraan antar sesama makhluk Tuhan – bukan saja manusia, tetapi juga bintang, lingkungan, dan kosmos yang lebih besar. Kita bisa memandang ini sebagai pemaknaan baru dari konsep *wihdatul wujud* atau kesatuan wujud. Kesatuan wujud bukan saja bermakna seperti yang dikenal selama ini. Kesatuan wujud juga berarti *the fellowship of beings* – persahabatan antara semua wujud yang ada, baik wujud yang berkesadaran maupun tidak.

Kesadaran baru tentang kesatuan wujud ini sudah mulai dikembangkan secara global, terutama oleh kelompok-kelompok spiritualis dan pecinta lingkungan, meskipun sebagai ide dan praktek sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Ini adalah semacam *l'histoire se répéte*, sejarah yang berulang. Tetapi tampaknya umat Islam masih ketinggalan dalam sektor ini. Padahal ajaran-ajaran sufi besar Islam sejatinya sudah mendahului dengan mengembangkan gagasan tentang kesatuan wujud. Tetapi gagasan sufi ini kurang begitu populer karena permusuhan kaum ortodoks Islam secara umum kepada filosofi *wihdatul*

wujud. Dalam pandangan kaum ortodoks ini, kesatuan wujud semata-mata dipahami sebagai leburnya batas antara Tuhan dan makhluk sehingga melanggar konsep tauhid. Padahal ada dimensi dalam gagasan wihdatul wujud ini yang sangat penting dan dilupakan oleh kaum ortodoks Muslim: yaitu kesadaran bahwa kita semua adalah sesama saudara sebagai wujud ciptaan Tuhan – *fellow beings*. Kesadaran semacam ini justru sangat kita butuhkan saat ini dalam kerangka berpikir ekosistemik, berpikir yang peka pada lingkungan – bukan lingkungan manusia saja, tetapi juga lingkungan binatang dan lain-lain.

Saya kira, ini sejumlah gagasan tambahan terhadap konsep yang sudah dirumuskan oleh Guntur dan teman-teman. Semoga bermanfaat.[]

Mohamad Guntur Romli

Mohamad Guntur Romli, lahir 17 Maret 1978, di Situbondo, Jawa Timur, alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura dan Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir, menulis beberapa buku: Dari Jihad Menuju Ijtihad, Ustadz Saya Sudah di Surga, Muslim Feminis, Syahadat Cinta Rabiah al-Adawiyah dan Islam Tanpa Diskriminasi.

Ciputat School

Ciputat School adalah komunitas aktivis dan intelektual yang ikut mendiskusikan dan mengembangkan gagasan Islam modern dan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Komunitas ini berdiskusi melalui media virtual dan jumpa darat setiap bulan sekali atau dua kali. Komunitas ini mulai terbentuk di tahun 2012.

Aktif di dalamnya antara lain Ihsan Ali Fauzi, Elza Peldi Taher, Denny JA, Budhy Munawar Rahman, Neng Dara, Fahd Pahdepie, dan mereka yang aktif di aneka kelompok studi sekitar Ciputat.

"Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara,
Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi."

—Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

"Islam Nusantara memiliki karakter Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran bukan "Islam Arab" yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara."

—KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU

"Buku yang disusun Mohamad Guntur Romli dan Ciputat School adalah bagian dari interpretasi Islam yang progresif itu. Ia menampilkan kembali essesial teaching atau nilai dasar Islam yang lebih modern. Di abad keemasannya, Islam bersinerji dengan peradaban Yunani. Kini dalam konsep Islam Nusantara, yang dimajukan Guntur Romli beserta team Ciputat School, adalah Islam ingin disinerjikan dengan prinsip ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, demokrasi dan pancasila."

—Denny JA, Pelopor Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi

Twitter: **@ciputatschool**
Facebook: **ciputatschool**